



**DINAMIKA KEBIJAKAN PENETAPAN GANDRUNG
SEBAGAI IDENTITAS KABUPATEN BANYUWANGI
PADA TAHUN 2002-2017**

SKRIPSI

Oleh

**Ike Yuliana
NIM 140210302055**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**DINAMIKA KEBIJAKAN PENETAPAN GANDRUNG
SEBAGAI IDENTITAS KABUPATEN BANYUWANGI
PADA TAHUN 2002-2017**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember dan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Ike Yuliana
NIM 140210302055

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sutikno dan Ibu Lilik Suryani yang telah membesarkanku, memberi dukungan, semangat serta doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
2. Saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak/Ibu Guru sejak taman kanak-kanak sampai SMA serta Bapak/Ibu Dosen Prodi Pendidikan Sejarah yang telah berjasa mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keiklasan, serta;
4. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan hanya kepada
Tuhanmulah, engkau berharap.

(Terjemahan surat *Al-Insyirah* ayat 6 dan 8)*)



* Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ike Yuliana

NIM : 140210302055

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2002-2017” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Oktober 2018

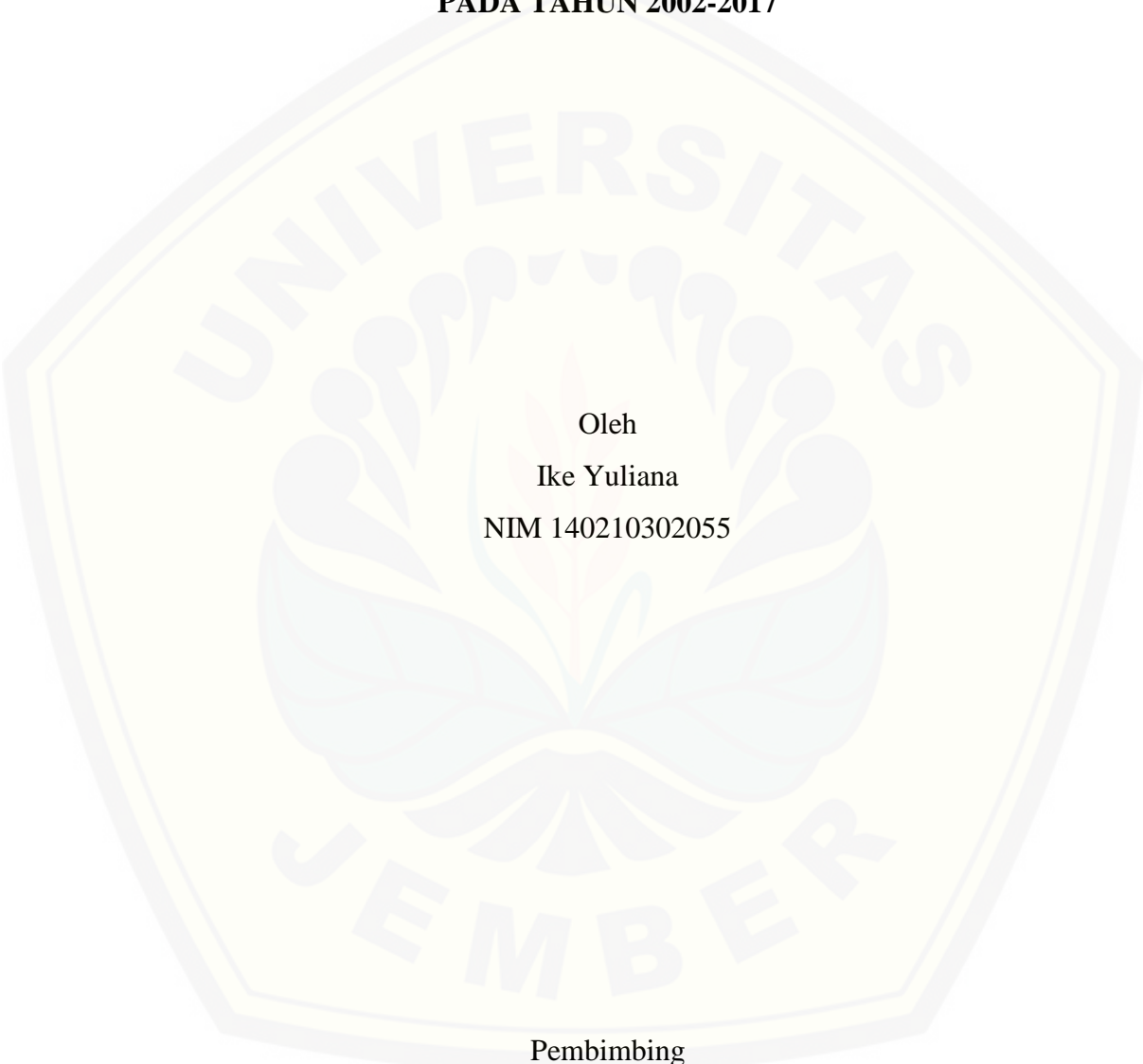
Yang menyatakan,

Ike Yuliana

NIM 140210302055

SKRIPSI

**DINAMIKA KEBIJAKAN PENETAPAN GANDRUNG
SEBAGAI IDENTITAS KABUPATEN BANYUWANGI
PADA TAHUN 2002-2017**



Oleh
Ike Yuliana
NIM 140210302055

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Sumarjono, M.Si
Dosen Pembimbing II : Drs. Sumarno, M.Pd

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung Sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2002-2017” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

hari : Jumat

tanggal : 12 Oktober 2018

tempat : Ruang Sidang Gedung 1 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sumarjono, M.Si.
NIP 195808231987021001

Drs. Sumarno, M.Pd.
NIP 760017263

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sugianto, M.Hum.
NIP 195702201985031003

Drs. Kayan Swastika, M.Si.
NIP 196702102002121002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP 196808021993031004

RINGKASAN

“Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2002-2017”; Ike Yuliana, 140210302055; 2018: (halaman 106 + xvii); Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Gandrung secara resmi ditetapkan sebagai maskot Banyuwangi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 173 Tanggal 31 Desember 2002. Dari berbagai budaya yang muncul dan berkembang di Banyuwangi, Gandrung terpilih sebagai maskot Kabupaten Banyuwangi. Dalam perkembangannya, Gandrung tidak hanya menjadi maskot pariwisata, namun mulai dipandang sebagai identitas umum Kabupaten Banyuwangi. Penetapan Gandrung menjadi identitas Banyuwangi didorong oleh beberapa kondisi sosial-politik yang berkembang disana.

Pengakuan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi memicu pertentangan dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai pemilihan Gandrung sarat akan kepentingan politik penguasa Banyuwangi saat itu. Gandrung dipandang sebagai alat untuk legitimasi hegemoni etnis Using di Banyuwangi. Bahkan, kaum agamawan menilai penetapan Gandrung tidak sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Banyuwangi yang sebagian besar muslim. Gandrung sebagai bagian manuver politik etnis tertentu yang sedang berkuasa, sementara beberapa agamawan dan tokoh organisasi massa islam yang memandangnya sebagai bentuk pengingkaran kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Banyuwangi adalah muslim yang disamping menolak patung juga menilai pertunjukan Gandrung sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: (1) bagaimana latar belakang penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi?; (2) bagaimana dinamika kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002-2017? Tujuan penelitian ini

adalah: (1) mengkaji latar belakang Gandrung ditetapkan sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi 2002; (2) mengkaji dinamika kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002-2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Langkah-langkah yang ditempuh adalah: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi, dan; (4) historiografi. Sumber-sumber primer yang digunakan adalah hasil tulisan Bupati Samsul Hadi, dokumen pemerintah, serta sumber lisan dari beberapa pihak yang terkait langsung dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor politik, ekonomi, dan sosial-budaya dibalik penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Dinamika penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi cukup fluktuatif, menyesuaikan dengan latar belakang penguasa Banyuwangi. Pada masa Bupati Samsul Hadi, Gandrung (dan juga kesenian Using lainnya) mendapat tempat yang cukup dominan bagi perkembangan Banyuwangi. Pergantian kekuasaan ke Bupati Ratna Ani Lestari berhasil meruntuhkan dominasi etnis Using di Banyuwangi. Pada masa terkini, Bupati Abdullah Azwar Anas cenderung menggunakan Gandrung sebagai pemersatu Banyuwangi yang multi etnis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menarik simpulan sebagai berikut: (1) latar belakang penetapan Gandrung menjadi identitas Banyuwangi didorong oleh keinginan Bupati Samsul Hadi untuk melakukan legitimasi kesenian Using di tengah keberagaman masyarakat Banyuwangi, meningkatkan perekonomian banyuwangi melalui pariwisata, dan untuk memunculkan eksistensi Using ke masyarakat luas.; (2) Selama tahun 2002 hingga 2018, penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi telah mengalami perkembangan dan perubahan. Pada masa kepemimpinan Bupati Samsul Hadi, Gandrung mendapat porsi yang cukup dominan dalam kegiatan-kegiatan resmi Pemkab Banyuwangi. Pada masa Bupati Ratna Ani Lestari, legitimasi Gandrung mulai meredup, sedangkan pada masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas perkembangan Gandrung banyak mengalami kemajuan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung Sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2002-2017”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Sumarjono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Drs. Sumarno, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Sugiyanto, M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, arahan dan kritik konstruktif dalam penulisan skripsi ini;
8. Drs. Kayan Swastika, M.Si., selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan;

10. Kedua orang tuaku Bapak Sutikno dan Ibu Lilik Suryani, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat yang tak pernah lelah;
11. Saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil;
12. Teman-teman seperjuangan Akhirul Ariyanto, Arti Permata Sari, Eka Setyorini, Muhammad Hafid Afandi, Ahmad Muhammad Muttafiq, Moh. Yusuf Randi, Bahrul Ulum, Fernanda Prasky Hartono yang telah memberikan dukungan dan semangat di masa perkuliahan;
13. Teman-teman angkatan 2014 dan teman-teman KKMT SMP Negeri 2 Jember Tahun 2017 yang telah memberikan dukungan serta semangat;
14. Semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PESERBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Prosedur Penelitian	19
3.2 Sumber Penelitian	23
BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	26
4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Banyuwangi	26
4.2 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Banyuwangi	28

BAB 5. LATAR BELAKANG PENETAPAN GANDRUNG SEBAGAI IDENTITAS KABUPATEN BANYUWANGI.....	32
5.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi	32
5.2 Faktor-Faktor Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi.....	34
5.2.1 Faktor Politik.....	34
5.2.2 Faktor Ekonomi.....	36
5.2.3 Faktor Sosial-Budaya	37
BAB 6. DINAMIKA KEBIJAKAN PENETAPAN GANDRUNG SEBAGAI IDEN-TITAS KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2002-2017	40
6.1 Perkembangan Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Banyuwangi.....	42
6.1.1 Masa Pemerintahan Bupati Samsul Hadi (2002-2005).....	42
6.1.2 Masa Pemerintahan Bupati Ratna Ani L (2005-2010).....	48
6.1.3 Masa Pemerintahan Bupati Abdullah Azwar A (2010-2017) ...	51
6.2 Perubahan terhadap Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Banyuwangi.....	53
6.3 Kesenambungan Gandrung sebagai Identitas Banyuwangi.....	55
BAB 7. PENUTUP.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Alur Kebijakan Publik..... 17



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.	Matriks Penelitian	61
Lampiran B.	Pedoman Wawancara.....	62
Lampiran C.	Hasil Wawancara	64
Lampiran D.	Foto-Foto Penelitian	69
Lampiran E.	Peta Kabupaten Banyuwangi	71
Lampiran F.	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi	72
Lampiran G.	Buku Karya Bapak Samsul Hadi.....	90
Lampiran H.	Surat Ijin Penelitian	100
Lampiran I.	Dokumentasi Wawancara.....	105

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak pada ujung timur pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Secara historis, Banyuwangi memiliki karakter khas dalam bidang pertumbuhan sosial dan budaya. Kabupaten ini juga sebagai tempat bertemunya beragam budaya. Terdapat berbagai macam etnis di Banyuwangi yang tentunya membawa budaya khasnya masing-masing. Masing-masing budaya tersebut mempunyai ciri khas dan bentuk seni yang melatarbelakangi setiap lingkungan masyarakatnya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam seni di tiap daerah tetap mempunyai pengaruh dan hubungan yang kuat antara satu dan lainnya.

Masyarakat Banyuwangi merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri atas kelompok masyarakat Using, Jawa, dan Madura. Dapat dilihat dari sejarahnya, jumlah penduduk Banyuwangi (pada masa itu bernama Blambangan) setelah jatuhnya Bayu pada tahun 1772 tidak lebih dari 3.000 orang atau sekitar 8,3 persen dari jumlah penduduk sebelum kedatangan Belanda di Blambangan (Margana, 2012: 229). Sebagai wilayah yang dihuni berbagai etnis, Banyuwangi sangat kaya akan potensi seni dan budaya serta adat istiadat. Semua etnis yang tinggal di Banyuwangi sangat peduli terhadap budaya tradisionalnya, salah satunya seni Gandrung.

Gandrung merupakan kesenian asli dan digemari oleh masyarakat, sehingga Gandrung tetap hidup dan berkembang di Banyuwangi bahkan pada tahun 1970 Gandrung mengalami puncak keemasannya. Gandrung merupakan salah satu hasil karya seni yang menjadi sarana untuk mengekspresikan keadaan batin masyarakat Banyuwangi pada masa Belanda. Syair-syair yang dibawakan dalam gendhing-gendhing Gandrung merupakan pesan-pesan yang mengisyaratkan perjuangan masyarakat dalam mengusir penjajah (Dariharto, 2009: 10).

Gandrung pada masa penjajahan Belanda tahun 1767, dimanfaatkan sebagai alat komunikasi para griliyawan laskar Blambangan untuk mengetahui kekuatan musuh, dengan istilah yang sering kita sebut mata-mata, dengan cara ‘Nandak’ atau ‘Ngamen’ disetiap markas-markas Belanda dengan memakai busana Gandrung (Anoegrajekti, 2015: 36). Pada masa awal kemerdekaan (sekitar tahun 1950) Gandrung diperebutkan oleh partai-partai politik sebagai alat penarik dukungan publik. Akhirnya, Gandrung dimanfaatkan untuk memobilisasi masa pendukungannya masing-masing secara terus-menerus. Partai-partai politik memerlukan dukungan praktis seperti pemilu sebagaimana kecenderungan partai politik sekarang. Gandrung sempat diidentifikasi sebagai propaganda komunis dan sejak peristiwa 1965 terkena larangan pentas, bahkan lagu-lagu yang didengarkannya tidak boleh dikumandangkan, dan tariannya pun menjadi terlarang. Hampir tujuh tahun sejak peristiwa tersebut, pentas Gandrung tidak terlihat lagi di Banyuwangi. Para seniman Gandrung yang dikategorikan komunis dibunuh atau menjadi tahanan politik dan mereka yang bukan komunis tidak berani mementaskannya. Seluruh masyarakat Banyuwangi ketakutan untuk mementaskan Gandrung yang dicap sebagai komunis (Anougrajekti, 2015: 38-39).

Gandrung sempat memudar dan kurang diminati oleh masyarakat, terutama generasi muda. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan revitalisasi budaya lokal melalui Festival Gandrung Sewu tahun 2012 dengan mengajak masyarakat turut berpartisipasi bukan hanya menjadi penonton, namun juga sebagai partisipan aktif. Gandrung pada era globalisasi ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan berbagai kesenian di Kabupaten Banyuwangi. Hampir semua aspek yang terdapat dalam Gandrung menjadi acuan dan sumber inspirasi berbagai kesenian tradisional Banyuwangi. Gandrung memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. setiap penampilan Gandrung yang dihadiri berbagai etnis dan agama, masyarakat bersama-sama menikmati tarian dan gendhing-gendhing Gandrung secara damai. Secara tidak langsung merupakan cara untuk saling berintegrasi antara satu etnis dengan yang lainnya tanpa ada perselisihan dari masing-masing etnis, Gandrung bisa dijadikan

sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa. Menciptakan rasa kesatuan dan pemersatuan dari berbagai etnis merupakan hal sangat penting dan menjadi tanggung jawab bersama, Gandrung memiliki daya tarik yang besar untuk mengingat rasa persaudaraan (Dariyanto, 2009:33).

Perkembangan yang cukup pesat ini menjadikan kesenian Gandrung sering diminta tampil di Istana Negara pada acara kenegaraan, penampilan Gandrung ini akhirnya banyak mempesona para tamu dan Negara dari berbagai bangsa sehingga Gandrung sangat diminati dan sering di undang untuk tampil di berbagai Negara di dunia seperti Hongkong, Amerika, Jepang, Cina, Belanda dan Korea. Sebagai salah satu jenis kesenian yang hidup dan berkembang berdampingan dengan bentuk kesenian yang lain, Gandrung masih menempati posisi yang cukup baik di hati masyarakat, keberadaan Gandrung dapat memperkaya budaya tradisional lain di Banyuwangi. menyadari akan potensi daya tarik Gandrung yang dan didukung oleh masyarakat Banyuwangi yang sangat menjunjung tinggi kesenian tradisionalnya maka melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 31 Desember 2002 Gandrung ditetapkan sebagai maskot pariwisata Kabuapten Banyuwangi (Dariharto, 2009:36).

Saat ini, Gandrung telah tampil sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Banyuwangi. Bahkan, sebagian orang mengenal Banyuwangi melalui kesenian Gandrung-nya. Popularitas Gandrung berhasil menciptakan suatu identitas baru bagi Banyuwangi, yakni Banyuwangi kota Gandrung. Sebelum dikenal sebagai kota Gandrung, Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan kota pisang. Fenomena ini didasarkan pada banyaknya kuantitas pohon dan volume panen buah pisang dari tanah Banyuwangi. Secara perlahan, identitas kota pisang bagi Banyuwangi mulai memudar ketika pemerintah mulai menggelorakan Gandrung sebagai maskot (simbol) Banyuwangi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang proses transisi dari identitas kota pisang menuju identitas kota Gandrung.

Berdasarkan hasil pengamatan Anoegrajekti (2011:1), pada tahun 2003 patung Gandrung banyak bermunculan di setiap mulut gang atau pintu gerbang desa, bahkan di pintu masuk kota Banyuwangi dari arah Situbondo terpanjang

patung berukuran raksasa. Bukan hanya orang luar, sebagian besar penduduk Banyuwangi pun bertanya-tanya tentang kejadian itu. Rupanya, Gandrung telah dijadikan penanda identitas dan maskot pariwisata. Kontroversi pun muncul di kalangan elit politik dan agama di Banyuwangi, apalagi tak lama setelah itu, muncuat keinginan untuk menetapkan Banyuwangi sebagai kota Gandrung. Sejumlah elit politik di badan legislatif setempat menyoroti bahwa “hujan patung” Gandrung sebagai bagian manuver politik etnis tertentu yang sedang berkuasa, sementara beberapa kyai dan tokoh organisasi massa islam yang memandangnya sebagai sesuatu yang mengingkari kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Banyuwangi adalah muslim yang disamping menolak patung juga menilai pertunjukan Gandrung sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Masyarakat yang plural memerlukan identitas untuk meneguhkan keberadaan atau eksistensi dirin ya. Identitas adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, lembaga atau bangsa. Dengan adanya ciri-ciri yang berbeda itu maka akan muncul kekhasan serta keunikan tersendiri sehingga akan mampu memberikan kebanggaan bagi pemiliknya. Salah satu peluang untuk menyatakan identitas diri ini adalah melalui seni. Seni dianggap potensial karena mampu mengekspresikan identitas diri kelompok secara ilmiah. Melalui seni simbol budaya, mitos dan keyakinan dari suatu kelompok dapat dinyatakan secara efektif dan otentik. Seni sebagai pemberi identitas mempunyai maksud bahwa melalui kekayaan seni yang ada di Banyuwangi mampu menunjukkan jati diri Banyuwangi di tingkat nasional maupun global. Sebagai ekspresi dari masyarakat pendukungnya, kesenian mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itulah penelitian ini dibuat untuk mengetahui identitas baru yang dibentuk oleh masyarakat Banyuwangi.

Berdasarkan beberapa uraian diatas penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017. Beberapa alasan penulis mengkaji lebih dalam mengenai Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017, diantaranya: (1) belum ada penelitian yang fokus mengkaji Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dengan lingkup

temporal 2002-2017; (2) Gandrung dipilih sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dari sekian banyak kesenian lain yang ada di wilayah tersebut; (3) Gandrung banyak diminati oleh masyarakat sampai akhirnya Gandrung sering diundang diberbagai acara baik tingkat nasional maupun internasional; (4) Gandrung merupakan kesenian asli Banyuwangi yang memiliki peranan penting pada masa penjajahan Belanda, masa awal kemerdekaan, hingga masa kini. Peneliti mengangkat tema **“Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2002-2017”** sebagai judul pada penelitian ini.

1.2 Penegasan Judul

Guna menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran, maka peneliti perlu menegaskan pengertian judul. Penegasan Judul dimaksudkan untuk menghindari kesalahan persepsi atau pemahaman dari pembaca mengenai judul penelitian yang ditetapkan yaitu *“Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2002-2017”*.

Dinamika merupakan gerak atau kekuatan yang dimiliki kelompok atau masyarakat yang dapat menimbulkan perkembangan, perubahan, kesinambungan dan perulangan dalam tata hidup masyarakat (kuntowijoyo, 2003:133). Perkembangan adalah suatu kondisi dimana terjadi pergerakan secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Pergerakan yang dimaksud dalam penelitian ini memungkinkan terjadi pada sikap pemerintah dan masyarakat Banyuwangi terhadap penetapan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi, serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dengan asumsi: (1) terjadi dalam waktu yang relatif cepat; (2) umumnya akibat mendapat pengaruh dari luar. Sedangkan Kesinambungan terjadi bila masyarakat mengadopsi lembaga-lembaga lama. Kesinambungan dalam suatu kesenian tradisional itu pasti terjadi, seperti pada kesenian Gandrung di Banyuwangi. Walaupun mengalami perkembangan dan perubahan dari berbagai segi didalamnya, namun nama pertunjukannya tetap yaitu kesenian Gandrung. Sangat jelas, bahwa yang dimaksud dengan dinamika adalah proses dalam tata hidup masyarakat yang dapat

menunjukkan adalah perubahan dan perkembangan namun tetap berkesinambungan. Hal seperti ini juga terjadi pada kesenian tradisional Gandrung di Banyuwangi. Kesenian Gandrung di Banyuwangi mengalami perkembangan, perubahan dan kesinambungan. Peneliti fokus pada perkembangan, perubahan dan kesinambungan penetapan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi.

Gandrung merupakan seni tari asli banyuwangi yang bersifat menghibur. Gandrung dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Penari yang berpasangan dengan laki-laki dikenal sebagai pemaju (Anoegrajekti, 2015:30). Gandrung merupakan penari remaja yang menggunakan kostum indah dan tampil pada berbagai acara pesta yang diiringi oleh orkes primitif (Scholte, 1924:1).

Identitas secara etimologis berasal dari dari kata *Identity*, yang berarti (1) kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain; (2) kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama diantara dua orang atau dua benda; (3) kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama di antara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda; (4) pada tataran teknis, pengertian etimologis di atas hanya sekedar menunjukkan tentang suatu kebiasaan untuk memahami identitas dengan kata 'identik' (Liliweri, 2009: 69). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 417) menjelaskan identitas merupakan ciri-ciri atau jati diri, baik individu maupun kolektivitas dengan perantara lambang-lambang yang dapat dikenal serta dibedakan dari identitas lain dari jenis-jenisnya. Lambang-lambang mewakili atau menyatakan identitas individu maupun kelompok, maka senantiasa menunjukkan ciri-cirinya (Soelaeman, 2001: 198).

Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki berbagai kesenian yang unik dan menarik, salah satu kesenian tersebut adalah kesenian Gandrung. Kesenian Gandrung adalah salah satu tarian tradisional Indonesian yang berasal dari Banyuwangi. Tari Gandrung dibawakan sebagai rasa syukur masyarakat pasca panen dan dibawakan dengan diiringi musik tradisional khas Jawa dan Bali (Sisterikoyasa, dkk 2017:3).

Jadi dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada latar belakang Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dan dinamika kebijakan penetapan gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2002-2017. Dengan demikian, penelitian ini fokus mengkaji Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2002-2017.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan menghindari penyimpangan uraian dan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, maka perlu dibatasi ruang lingkup agar permasalahan terfokus pada masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi materi, waktu (temporal), dan tempat (spasial).

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini menitik beratkan pembahasan yang berkaitan dengan Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002-2017. Lingkup materi yang dibahas meliputi: latar belakang penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi, dan Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2002-2017.

Lingkup waktu (temporal) dalam penelitian ini ialah Tahun 2002-2017. Tahun 2002 diambil sebagai dasar awal penelitian, karena pada tahun 2002 awal di tetapkannya Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan tahun 2017 merupakan batasan akhir dengan merujuk pada pertimbangan bahwasannya penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Penentuan lingkup tempat (spasial) pada penelitian ini di Kabupaten Banyuwangi. Adapun lokasi pengambilan data dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Dewan Kesenian Blambangan, serta masyarakat mengenai Gandrung di Banyuwangi. Peneliti juga melakukan dokumentasi patung-patung Gandrung yang tersebar di berbagai penjuru Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) bagaimana latar belakang penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002?
- 2) bagaimana dinamika kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) mengkaji latar belakang penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002;
- 2) mengkaji dinamika kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) bagi peneliti, sebagai pelatihan menulis karya ilmiah dan pelatihan dalam melakukan penelitian, serta menambah wawasan tentang Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017;
- 2) bagi penelitian selanjutnya, dapat memotivasi untuk melakukan penelitian yang sejenis secara mendalam;
- 3) bagi pembaca, dapat memberikan pengetahuan tentang Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi, dan;
- 4) bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman kajian sejarah, terutama mengenai Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi.

- 5) bagi Kabupaten Banyuwangi, diharapkan dapat meningkatkan semangat pelestarian budaya dan menjaga keharmonisan masyarakat ditengah keberagaman etnis.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Abdurahman (2007: 61) penelitian sejarah perlu memaparkan sejarah penulisan (historiografi) dalam bidang yang akan diteliti dan seluruh hasil penelitian yang akan di-*review*. Peneliti memaparkan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang seni sebagai identitas suatu wilayah dan pembahasan eksistensi Gandrung. Pada tinjauan pustaka ini peneliti juga akan membahas mengenai pendekatan dan teori yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini. Peneliti telah mencari dan mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang lokasi penelitiannya berada di tempat atau daerah lain.

Skripsi karya Dewi (2014) yang berjudul “*Tari Batik Jlamprang Sebagai Identitas Budaya Kota Pekalongan, Jawa Tengah*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teori untuk penelitiannya hanya menggunakan pendekatan. Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah *Batik Jlamprang* yang merupakan warisan kebudayaan yang memiliki nilai *adiluhung* dari keluarga kerajaan di nusantara. *Batik Jlamprang* merupakan batik yang menggambarkan mengenai topografi masyarakat pekalongan dan cara membatik motif *Batik Jlamprang*. Peneliti membahas tentang sejarah tari *Batik Jlamprang* yang merupakan tari batik dari kota pekalongan yang menggambarkan batik khasnya *Batik Jlamprang*. *Batik Jlamprang* merupakan batik kuno yang khas kota pekalongan. Kota Pekalongan dikenal sebagai kota Batik karena pusat batik yang berada di Pekalongan dan Batik tersebut menjadi slogan dari kota Pekalongan. Pemerintah pekalongan melakukan berbagai upaya untuk terus meletarikan tari *Batik Jlamprang* dengan mengadakan pelatihan, lomba dan festival *tari Batik Jlamprang* baik di dalam kota pekalongan maupun di luar kota pekalongan. Keberadaan tari *Batik Jlamprang* mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat dan tari *Batik Jlamprang* dikenal sebagai identitas dari kota Pekalongan.

Skripsi lain yang membahas Identitas kota pernah ditulis Faridatin (2016) yang berjudul “*Identitas Masyarakat Kabupaten Gresik Pasca-Industrialisasi (Studi atas perubahan sosial di Kota Santri)*”. Pada skripsi ini Peneliti menggunakan teori ruang publik oleh Jurgen Habermas yang menjelaskan yang akan menjelaskan identitas dan teori structurasi oleh Anthony Giddens yang akan menjelaskan perubahan sosial, dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan teori untuk penelitiannya tidak menggunakan pendekatan. Skripsi ini membahas mengenai masyarakat Kabupaten Gresik pasca-industrialisasi dan perubahan sosial di Kota Santri, identitas masyarakat Gresik pasca-industrialisasi terlihat adanya perubahan yang artinya ada identitas baru. Identitas masyarakat Gresik adalah Kota Santri dan identitas barunya sebagai Kota Industri. Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan identitas masyarakat Gresik menyandang *city branding* sebagai Kota Industri. Faktor tersebut adalah faktor sosio-historis yaitu antara proses islamisasi di Nusantara dan cara dakwah yang ditempuh dengan melalui jalur perdagangan yang berpusat di pelabuhan. Hal ini yang kemudian dijadikan masyarakat Gresik yang lambat laun menjadi tumpuhan dan tujuan dari pertumbuhan industri. Selanjutnya faktor sosial ekonomi ini juga mendukung adanya perubahan identitas masyarakat Gresik sebagai Kota Industri. Faktor sosial ekonomi merupakan modal simbolik yang memiliki peran dalam proses perubahan identitas masyarakat Gresik.

Faktor lain yang menyebabkan perubahan identitas adanya perubahan politik pemerintah, perkembangan industri di Indonesia mengalami pasang surut. Gresik merupakan salah satu kota penyangga Provinsi Jawa Timur, kebijakan pemerintahan Kabupaten Gresik yang mengajak para investor berbondong-bondong berinvestasi di Gresik, menjadikan Gresik sebagai lautan pabrik. Perubahan identitas Kota Santri pada masyarakat Kota Gresik merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara bertahap dan pasca-industrialisasi masyarakat Gresik menyandang *city branding* sebagai Kota Industri, tetapi masyarakat Gresik akan terus mempertahankan identitas positif mereka karena masyarakat Gresik yang mayoritas adalah orang muslim.

Penelitian selanjutnya oleh Sindara (2013) yang berjudul “*Tari Kretek sebagai identitas budaya kabupaten kodus Jawa tengah*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Peneliti tidak menggunakan teori untuk penelitiannya. Penelitian ini membahas tentang Tari *Kretek* yang diciptakan agar Kabupaten Kudus memiliki suatu identitas yang menggambarkan budaya masyarakat Kabupaten Kudus yang dikenal sebagai kota produksi rokok dan Kota Wali. Tari *Kretek* merupakan identitas daerah yang menggambarkan ciri khas budaya Kabupaten Kudus sebagai penghasil rokok dan Kota Wali. Tari *Kretek* juga memiliki makna yang gerakannya menggambarkan proses pembuatan rokok, busana dan aksesoris Yang menggambarkan budaya Kudus dan tembang dalam iringan menceritakan keadaan Kabupaten Kudus. Masyarakat bertanggung terhadap tari *kretek* yang telah mengalami perkembangan tidak mengurangi makna dalam tari tersebut. Masyarakat kudus tetap menghargai tari Kretek sebagai budaya daerah yang mengangkat kehidupan masyarakat Kudus sebagai pekerja rokok.

Penelitian ini membahas Gandrung yang di tulis oleh Fawaid (2015) yang berjudul “*Eksistensi Seni Tari Gandrung di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini tidak menggunakan teori maupun pendekatan. Peneliti membahas tentang Eksistensi Gandrung di desa kemiren yang mengalami pasang surut. Namun kondisi surut mampu membangkitkan semangat untuk menampilkan kreasi-kreasi yang lebih menarik dan diminati oleh masyarakat. Hal tersebut tampak dalam perubahan konsum, pergantian pemeran penari Gandrung yang dulunya laki-laki, sekarang diperani oleh penari perempuan, penambahan musik, memasukkan lagu-lagu baru yang sedang digemari masyarakat. walaupun banyak manfaat kesenian yang terdapat di Banyuwangi, kesenian Gandrung menempati tempat tersendiri dihati masyarakat karena banyak mengandung sejarah dan bagaimana perjuangan para seniman Gandrung dalam melestarikannya. Gandrung tidak sekedar sebagai pemenuh kebutuhan belaka, lebih dari itu, kesenian ini dijadikan medium komunikasi pada masa perjuangan rakyat Blambangan, terkadang menjadi mata-mata para griliyawan, penari

menyampaikan peran penting secara simbolik kepada masyarakat akan perjuangan pendahulunya dalam mempertahankan kekuasaan Banyuwangi dari jajahan Belanda. Melalui gending-gending yang dinyanyikan dalam setiap pertunjukan. Gandrung termasuk kesenian tradisional, namun masih mempunyai nilai ekonomi atau marketable di tengah-tengah kesenian modern, masyarakat masih menggemari kesenian tersebut, dengan adanya setiap tanggapan dari berbagai daerah, baik luar Banyuwangi, seperti Jember, dan Kalimantan pada acara-acara hajatan tertentu, seperti khitanan, resepsi pernikahan, selamatan desa, dan petik laut. Itu mengidentifikasi jika keberadaan Gandrung masih dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat. Terdapat grup seniman Gandrung di desa kemiren yang selalu inten dalam melestarikan kesenian Gandrung, yaitu Temu Mesti selaku Gandrung rtertua, dan Madaiyah selaku penari Gandrung muda. Upaya pelestarian seniman Gandrung kemiren, dengan cara pelatihan-pelatihan kepada generasi muda. Masyarakat menganggap penari Gandrung muda lebih fresh dan membuat Temu selalu berimprovisasi dalam setiap penampilannya.

Skripsi selanjutnya membahas Dinamika yang di tulis oleh Putri (2017) yang berjudul "*Dinamika Kesenian Tradisional Reog Ponorogo di Kecamatan Yosowilangun*". Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan antropologi budaya dan menggunakan teori difusionisme. Penelitian ini membahas tentang dinamika yang terjadi pada unsur-unsur kesenian tradisional Reog Ponorogo. Kesenian tradisional Reog Ponorogo yang mengalami perkembangan, perubahan dan kesinambungan. Pada penelitian ini penulis mengkaji mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 1990-1995 kesenian Reog Ponorogo juga mengalami perkembangan yaitu seniman, masyarakat/penonton, musik dan kostum. Selain mengalami perkembangan, kesenian Ponorogo juga mengalami suatu perubahan pada unsur tat ruang atau tata panggung. Pada tahun 1990-1995 belum ada kesinambungan antara perkembangan, perubahan dalam setiap komponen atau unsur. Pada tahun 1995-2000 kesenian Reog Ponorogo yang mengalami perkembangan yaitu seniman, masyarakat/penonton, tarian pengiring, musik dan kostum. Pada tahun 1995-2000 kesinambungan antara unsur-unsur tambahan dalam perkembangan dan perubahan. Unsur-unsur tambahan yang

berkesinambungan adalah musik, tarian pendukung dan kostum. Pada tahun 2000-2015 kesenian Reog Ponorogo yang mengalami perkembangan yaitu seniman, masyarakat/penonton, tarian pengiring, musik dan kostum. Selain mengalami perkembangan, kesenian Reog Ponorogo juga mengalami suatu perubahan pada unsur tarian pengiring, musik dan kostum. Pada tahun 2000-2015 kesinambungan antara unsur-unsur tambahan dalam perkembangan dan perubahan. Unsur-unsur yang saling berkesinambungan adalah musik, tarian pendukung dan kostum.

Penelitian selanjutnya oleh Raharjo (2015) yang berjudul “*Dinamika Kesenian Gandrung di Banyuwangi*”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori sejarah yang mengkhususkan pada teori eksplanasi sejarah. Teori ini mengedepankan pada penjelasan sejarah yang sudah didahului dengan pencarian bukti-bukti sejarah dan mencari penghubungan satu sama lain. Dari penelitian ini terlihat bahwa terjadi perubahan-perubahan dalam perjalanan kesenian *Gandrung*, bahkan jauh sebelum tahun penelitian dimulai, yakni ketika *Gandrung* mulai dimainkan oleh perempuan (1895). Perubahan ini merupakan bukti dari terbukannya kesenian *Gandrung* terhadap keadaan di sekitarnya (sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama). Keterbukaan dimulai ketika penonton kesenian *Gandrung* tidak hanya dari kalangan Using, melainkan dari kelompok-kelompok etnik lain, maka lagu (*Gendhing*) di luar Using dimaksukkan dalam pertunjukkan. Memasuki tahun 1950 kesenian *Gandrung* sering dijadikan bagian dalam kampanye partai yang dikoordinir oleh lembaga kebudayaan saat itu, sebut saja Lekra dan LKN. Keadaan yang membuatnya “tersangkut” dalam peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S). Vakum selama kira-kira enam tahun, kesenian *Gandrung* kembali bangkit bersamaan dengan kebijakan revitalisasi kebudayaan Using oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1970. Kesenian *Gandrung* kembali dijadikan alat menarik masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Dinas Penerangan.

Penelitian ini menjelaskan pasca reformasi *Gandrung* ditetapkan sebagai makot pariwisata Banyuwangi pada tahun 2002, dan tari jejer *Gandrung* pada tahun 2003. Keadaan yang membawa *Gandrung* dalam perdebatan politik terkait pemilihan *Gandrung* sebagai “Identitas” Banyuwangi, serta dominasi simbol

Gandrung dan budaya Using dalam dalam “menggambarkan” Banyuwangi. Pada tahun 2011-2013 *Gandrung* semakin terkenal bersama dengan festival internasional yang berhasil diselenggarakan pemerintah daerah (BEC dan *Gandrung* sewu). Kemeriahan yang berhasil “menutupi” permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia *Gandrung*, sebut saja permasalahan *Gandrung* dengan kaum agamawan, *Gandrung* sebagai kesenian tradisional yang berhadap dengan selera pasar, serta “tenggelamnya” kesenian *Gandrung Terop* (asli) di bawah *Gandrung* kreasi baru dalam dunia pariwisata Banyuwangi.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ada kajian sejarah yang mengungkap *Gandrung* sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dengan lingkup spasial dari 2002 hingga 2017. Penelitian ini menjadi temuan baru yang menjelaskan dinamika *Gandrung* sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dari masa awal hingga masa-masa terkini. Permasalahan penetapan *Gandrung* menjadi identitas Kabupaten yang akan diteliti meliputi: latar belakang, perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang terjadi pada penetapan *Gandrung* sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti perlu menggunakan pendekatan dan teori sebagai alat bantu untuk mengkaji penelitian ini. Menurut Kartodirjo (1992:4) dalam menggambarkan suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan, yaitu dari segi mana memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan dan lain sebagainya. Sehingga penulis lebih terarah dan dapat fokus dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah.

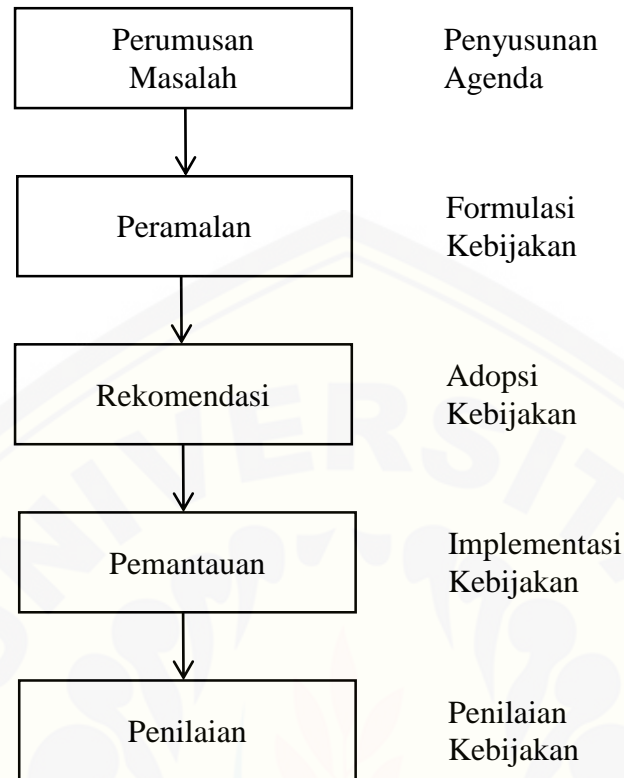
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi politik. Menurut Balandier (1996:3) antropologi politik adalah langkah ilmiah untuk melihat dan memahami gejala-gejala politik hingga makna yang tersirat. Antropologi politik menjelaskan dan mempelajari berbagai hal yang membentuk kekuasaan, sistem-sistem kekuasaan tersebut, hingga landasan-landasan yang mendasari sistem tersebut. Antropologi politik menyoroti pergerakan tingkah laku dan kebudayaan yang berorientasi kepada proses, menuju sintesis baru dengan menggunakan analisa struktur yang telah diperbarui (Sianipar, 2002). Manfaat antropologi politik pada penelitian ini adalah mengkaji

pergerakan aktor politik (dalam hal ini Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banyuwangi), turut mengambil bagian dalam berbagai konflik vertikal dan konflik horizontal di wilayah yang terjadi benturan kepentingan. Pada penelitian ini yang dimaksudkan benturan kepentingan adalah konflik kepentingan dalam rangka penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi hingga dinamika yang terjadi didalamnya.

Teori yang digunakan peneliti sebagai instrumen untuk menganalisis latar belakang Gandrung ditetapkan sebagai identitas pada penelitian ini adalah teori analisis kebijakan publik. Teori ini menitikberatkan pada pengetahuan tentang sebab, akibat, dan kinerja kebijakan publik (Dunn, 2003: 1). Teori kebijakan publik melihat keputusan pemerintah sebagai tindakan politis dengan tujuan memperoleh dukungan masyarakat.

Metode analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan cara-cara deskriptif maupun normatif. Cara deskriptif bertujuan untuk mengetahui tentang sebab-sebab maupun akibat dari penerapan suatu kebijakan publik. Cara normatif digunakan untuk mengkritisi nilai-nilai kebijakan publik baik bagi generasi saat ini maupun yang akan datang (Dunn, 2003:3). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara deskriptif karena lebih sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

Peneliti memandang penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi sebagai suatu langkah kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil keputusan politik dengan menetapkan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menganalisis fenomena ini dengan skema kebijakan publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2003:25) sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema Alur Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik dinilai cukup relevan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Peneliti mengungkap fenomena penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dengan fokus kajian pada analisis latar belakang permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002.

Teori yang digunakan untuk rumusan masalah kedua merupakan teori dinamika. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok heterogen. Dinamika sebagai inti jiwa masyarakat, banyak sosiologi modern yang mencurahkan pada masalah-masalah perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat (Soekanto, 2007: 260). Dinamika yang terjadi menyebabkan perubahan sosial terhadap masyarakat, perubahan bagi masyarakat

yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya. Perubahan tersebut berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok dan perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang berjalan lambat sekali tapi ada juga yang berjalan cepat (Soekanto, 2007: 261). Dengan teori ini, peneliti yang mengkaji mengenai Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwang pada Tahun 2002-2017.

Menurut spencer (dalam Narwoko, 2004: 379) dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap masyarakat, walau secara lambat namun pasti akan selalu bergerak, berkembang dan akhirnya berubah dari struktur yang sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara mendalam perkembangan, peubahan dan kesinambungan Gandrung menjadi identitas Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2002-2017.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam karya tulis ini adalah penelitian sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan dalam Abdurrahman (2007:53), metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Sedangkan menurut Gattschalk, (1986: 32), metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang dinamakan historiografi. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur peneliti untuk menguji dan menganalisis sumber-sumber masa lampau secara logis, kritis, dan kronologis. Metode penelitian sejarah memiliki empat langkah, yaitu: (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

1. Heuristik

Tahap heuristik merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Abdurrahman (2007:64) menyatakan bahwa dalam mengumpulkan sebuah sumber peneliti menggunakan suatu teknik, teknik yang dimaksud *heuristik*, yang berasal dari kata Yunani *heurishein*, yang artinya memperoleh. Sedangkan menurut G.J. Renier (1997:113) dalam Adurrahman (2007:64), *heuristik* adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu.

Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan sumber sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini bersifat studi pustaka dan studi lapang, maka pada tahap ini penulis mencari sumber-sumber tertulis, dokumen, maupun penelitian terdahulu. Penulis mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain buku penunjang peneliti melengkapi data dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian.

1) Wawancara

Wawancara memiliki pengertian yang beragam, diantaranya wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara (Husein 2004:51). Peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan informan (*key informant*). Kegiatan wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah disiapkan oleh peneliti agar peneliti memperoleh informasi sesuai dengan tema penelitian. Berikut beberapa pihak yang akan menjadi informan pada penelitian ini:

- a) Bapak Suko Prayitno, S. Pd, sebagai Ketua Seksi Tari pada Dewan Kesenian Blambangan sekaligus pemilik Sanggar Tari Gandrung Arum, Cluring-Banyuwangi.
- b) Bapak Ir. Choliqul Ridha, M.Si, sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- c) Bapak Rustadi, sebagai penari Gandrung sekaligus cucu dari Ibu Semi pelopor tari Gandrung Banyuwangi.

2) Dokumentasi

Sugiyanto (2009: 21) mengatakan bahwa, dokumen ialah segala sesuatu, tertulis dan tidak tertulis yang memberikan keterangan tentang masa lampau berupa informasi (*documentum, docero = yang mengajar*). Karena begitu penting, dokumen itu dapat memberikan keterangan tentang masa lampau, ada ungkapan yang berbunyi “*No documents no history*”. Pada tahap dokumentasi ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber tertulis, buku-buku, laporan penelitian yang relevan, internet, artikel dan jurnal yang diperoleh dari berbagai perpustakaan.

2. Kritik Sumber

Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah melakukan kritik. Kritik yaitu langkah peneliti dalam menguji dan menyeleksi sumber-sumber sejarah. Kritik digunakan sebagai usaha untuk mempertimbangkan apakah suatu sumber atau data yang diproses benar-benar otentik atau tidak (Widja, 1998:21). Langkah kritik ini bertujuan untuk menyeleksi data sebagai fakta. Langkah kritik sejarah ini meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah uji keabsahan tentang keaslian sumber (autentisitas), sedangkan kritik intern adalah uji keabsahan tentang kesahihan sumber/kredibilitas (Abdurahman, 2007:75).

Langkah kedua dalam penellitian ini peneliti melakukan kritik. Kritik merupakan langkah peneliti dalam menguji dan menyeleksi sumber-sumber sejarah. Kritik digunakan sebagai usaha untuk mempertimbangkan apakah suatu sumber atau data yang diproses benar-benar otentik atau tidak Widya (1998, 21). Langkah kritik ini bertujuan untuk menyeleksi data sebagai fakta. Menurut Abdurahman (2007: 68) Dalam hal ini melakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (autentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. Berikut beberapa kritik yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kritik ekstern dilakukan oleh peneliti dengan cara menyeleksi dan menganalisis secara rinci sumber yang telah terkumpul yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan kritik ekstern terhadap beberapa sumber-sumber yang digunakan, peneliti menelaah secara detail sumber-sumber yang sudah diperoleh mulai dari latar belakang, peneliti, tahun terbit, kertas yang digunakan dan keasliannya. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi yang didapat dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kritik intern ini dilakukan oleh peneliti untuk menilai kelayakan atau kreadibilitas sumber. Kreadibilitas sumber bertujuan membandingkan sumber yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Setelah itu,

peneliti membandingkan hasil wawancara yang didapat yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari sumber studi pustaka yang diperoleh. Agar mempermudah membandingkan antara sumber studi pustaka dan wawancara, peneliti melakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah, secara cermat sumber-sumber yang berkaitan dengan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan sumber yang diperoleh melalui wawancara, agar mempermudah untuk membandingkannya, peneliti melakukan perekaman dan pencatatan di buku kecil untuk mempermudah peneliti membandingkan antara sumber wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara cermat sumber mana yang mempunyai tingkat keberanian yang tinggi.

3. Interpretasi

Tahap ketiga dalam penelitian sejarah adalah melakukan interpretasi. Kuntowijoyo dalam Abdurahman (2007: 73) menjelaskan interpretasi dilakukan melalui dua metode, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Sedangkan menurut Pranoto, (2010: 56) Interpretasi sangat esensial dan krusial di dalam metodologi sejarah. Interpretasi dapat dilakukan dengan analisis dan sintesis. Interpretasi dapat dikatakan sebagai langkah menafsirkan sumber yang berkaitan dengan melakukan analisis dan sintesis agar mendapatkan fakta yang logis dan kronologis. Peneliti menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta sejarah yang didapat dari sumber sejarah yang sudah di analisis secara kronologi dan logis. Peneliti menghubungkan makna dari fakta-fakta sejarah dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan juga buku penunjang yang terkait dengan Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi secara kronologis. Setelah peneliti memperoleh fakta-fakta sejarah yang sesuai dan cocok, kemudian memperoleh sebuah kesimpulan yang objektif dan rasional dapat disusun dan ditulis dalam tahap historiografi.

4. Historiografi

Menurut Abdurahman (2007: 76) historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Gottschalk (1986: 33) historiografi adalah dilakukan oleh penulis dengan menyusun dan menulis cerita sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang didapat dari ketiga langkah yang dipaparkan di atas dan berusaha merekonstruksi imajinasi dengan cara menulis fakta sejarah menjadi kisah sejarah sehingga menjadi kronologis, logis dan sistematis. Pada tahap ini peneliti dapat merangkai fakta-fakta sejarah secara sistematis dan kronologis yang diungkap dengan menggunakan bahasa yang baik dan disampaikan sesuai dengan perjalanan sejarah.

3.2 Sumber Penelitian

Sumber-sumber tulisan dan lisan dibagi atas dua jenis yaitu: Sumber primer dan sumber sekunder. Sebuah sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (saksi pandangan mata). Sebuah sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang disaksikannya. Karena sumber primer demikian harus dihasilkan oleh orang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan (Gottschalk, 1986: 35)

Sumber-sumber primer maupun sekunder sangat penting bagi sejarawan, karena mengandung unsur-unsur primer mengandung unsur-unsur primer (atau setidaknya menyarankan untuk petunjuk-petunjuk kepada unsur-unsur primer). Unsur-unsur yang disampaikan dapat dipercaya bukanlah karena buku atau artikel atau laporan yang mengandungnya, melainkan karena ada yang mengkisahkannya dapat dipercaya sebagai saksi daripada unsur-unsur tersebut (Gottschalk, 1986:37)

Sumber primer yang didapatkan oleh peneliti merupakan sumber lisan atau wawancara serta arsip-arsip Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Untuk

memperoleh sumber-sumber tersebut, peneliti melakukan beberapa tindakan sebagai berikut.

- 1) Menghubungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi di Jl. Jend. A. Yani No. 78, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti bertemu dengan Bapak Choliqul Ridha, Kepala Bidang Kebudayaan pada instansi tersebut.
- 2) Menghubungi Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Kabupaten Banyuwangi di Jl. Adi Sucipto No.118, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menemui Seksi Tari DKB, Bapak Suko Budiyanto.
- 3) Menelusuri sumber-sumber arsip dan dokumen lainnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.43, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
- 4) Menelusuri sumber-sumber arsip Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Banyuwangi di www.jdih.banyuwangikab.go.id (*online*).

Peneliti juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa skripsi, jurnal, maupun buku-buku yang relevan dengan judul penelitian. Peneliti mencari sumber sekunder dengan mendatangi berbagai tempat, yaitu: Perpustakaan universitas Jember, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi dan Perpustakaan Banjoewangie Tempoe Doeloe, serta koleksi pribadi penulis. Selain itu, peneliti juga mencari sumber-sumber online berupa jurnal ilmiah yang relevan dengan judul penelitian.

Beberapa sumber sekunder yang ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah: (1) Identitas Gender Kontentasi Perempuan Seni Tradisi karya Novi Anoegrajekti; (2) Kebudayaan Using Kontruksi Identitas dan Pengembangannya karya Novi Anoegrajekti; (3) Podho Nonton (Politik Kebudayaan dan Respresentasi Identitas Using karya Novi Anoegrajekti; (4) Penari Gandrung dan Gerak Sosial Banyuwangi karya Novi Anoegrajekti; (5) Islamisasi Gandrung Banyuwangi

karya Achamd Aksoro; (6) Gandroeng Van Banjoewangie karya Jon Scholte; Sumber-sumber yang dipaparkan di atas digunakan oleh penulis sebagai rujukan dalam penelitian ini, namun penulis tidak membatasi hanya sumber-sumber di atas, penulis akan mencari referensi-referensi yang relevan sebagai rujukan penelitian.

Penyajian karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terdiri atas 6 bab. Bab 1 pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan dan *me-review* penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian, pendekatan penelitian dan teori yang digunakan. Bab 3 metode penelitian, dalam hal ini berisikan tentang metode penelitian sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Bab 4 menguraikan gambaran umum daerah penelitian. Bab 5 menguraikan latar belakang penetapan Gandrung dijadikan sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Bab 6 menguraikan dinamika kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Bab 7 berisi penutup, yang isinya melingkupi simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini nantinya harus mewakili dari isi penelitian, yakni mengenai “Dinamika Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2002-2017”. Sedangkan saran yang akan ditulis dapat ditunjukkan bagi pembaca, maupun instansi yang terkait.

BAB 4. GAMBARAN UMUR DAERAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis dan Demografis Banyuwangi

Secara Geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur, Pulau Jawa. Berdasarkan garis teritorial Banyuwangi terletak diantara 7 43'- 8 46' Lintang Selatan 113 53'- 114 38' Bujur Timur (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2010). Secara administratif Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Banyuwangi terletak pada posisi yang cukup strategis. Banyuwangi dikelilingi selat Bali. Terdapat Pelabuhan nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Banyuwangi menjadi pintu masuk ke Bali melalui jalur darat. Garis pantai Banyuwangi cukup panjang, menyimpan potensi pariwisata yang cukup menjanjikan.

Luas Banyuwangi sekitar 5.782,50 Km², dengan pembagian wilayah sebanyak 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut yakni kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorejo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, dan Licin. Selain itu, ada juga sebutan perkotaan Banyuwangi yang merupakan daerah pusat dari Kabupaten Banyuwangi, yang terdiri dari 4 kecamatan, yakni Banyuwangi, Giri, Glagah, dan Kalipuro. Jumlah kecamatan di Banyuwangi pernah mengalami perubahan, tercatat pada tahun 1985 sampai dengan 1996 kabupaten Banyuwangi terdiri dari 19 kecamatan, sedangkan mulai tahun 1997 sampai 2005 berubah menjadi 21 kecamatan dan diperbarui pada akhir tahun 2005 Kabupaten Banyuwangi memiliki 24 kecamatan baru yakni Tegalsari, Siliragung dan Licin (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2010).

Jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sebesar 1.627.130. Banyuwangi memiliki kecamatan terbesar jumlah penduduknya yakni

kecamatan muncar dengan jumlah penduduk 126.713 Jiwa. Jumlah penduduk di Banyuwangi mengalami penurunan dari tahun 2012 yakni 1.627.469. Penurunan penduduk disebabkan oleh adanya migrasi keluar. Selain itu, jumlah penduduk Banyuwangi mengalami perubahan besar akibat adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 1985 tercatat jumlah penduduk di Banyuwangi sebesar 1.367.682. pada tahun 1990 penduduk di Banyuwangi berkisar antara 1.450.000, sedangkan pada tahun 2000 penduduk Banyuwangi naik menjadi 1.500.000. barulah pada tahun 2007 penduduk di Banyuwangi mencapai kisaran angka 1.600.000, penduduk Banyuwangi mengalami peninggkatan yang cukup besar. Di antara perubahan-perubahan jumlah penduduk yang terjadi dalam rentan waktu tersebut, kecamatan Muncar merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, misalnya pada tahun 1997 dengan jumlah penduduk mencapai 115.544 orang. Selain itu, pada tahun 1985-1996 kecamatan Genteng memiliki jumlah penduduk terbanyak (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2010).

Pada tahun 2010 kepadatan penduduk Banyuwangi mencapai 281,38 Jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi adalah kecamatan Banyuwangi, yakni sebesar 3.827,18 jiwa/km². Kabupaten Banyuwangi tergolong rendah dalam hal pendidikan, tercatat 602.177 jiwa yang hanya mampu menempuh pendidikan tingkat SD, dengan jumlah kepala keluarga yang menamatkan SD sebesar 278,628 jiwa dan terdapat 31.778 kepala keluarga yang hanya mampu menamatkan pendidikan SD sebesar 278,628 jiwa. Selain itu, terdapat kepala keluarga yang tidak bersekolah. Kabupaten Banyuwangi terdapat 1.422 sekolah baik SD, SMP sampai SMA atau MA (Banyuwangi dalam Angka, 2011)

Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (2011), penduduk Banyuwangi rata-rata bermata pencarian sebagai petani, dengan jumlah sebesar 157,587 orang, jumlah tersebut dihitung dari kepala keluarga yang terdapat di Banyuwangi. Jumlah ini memiliki persentase sebesar 28% dari jumlah keseluruhan kepala keluarga yang mencapai jumlah 571.339. kepala keluarga yang bermata pencarian di perkebunan atau sebagai buruh tani mencapai jumlah 22,170 orang. Selain itu wiraswasta dengan jumlah 238,129 orang.

Mayoritas penduduk Banyuwangi beragama Islam yang berjumlah 1.568.721 orang. Jumlah persentasunya mencapai 96,41% dari jumlah keseluruhan penduduk Banyuwangi. Wilayah Banyuwangi yang memiliki jumlah penduduk yang beragama islam terbanyak yakni kecamatan Muncar dengan jumlah 123.272 orang atau dengan persentase 97,28% dari jumlah penduduk di kecamatan Muncar. Selain kecamatan Muncar, kecamatan Licin merupakan kecamatan yang memiliki persentase terbesar jumlah penduduk yang beragama islama yakni mencapai 99,65% dari jumlah penduduknya. Pemeluk agama kedua terbesar adalah agama Hindu yang mencapai jumlah 25.758 orang atau 1,58% dari jumlah keseluruhan penduduk Banyuwangi. Setelah itu, agama Kristen berjumlah 18.692 orang atau dengan persentase 1,14%, yang beragama Katolik berjumlah 5.494 orang atau dengan persentase 0,33%, yang beragama Budha berjumlah 4.504 orang atau dengan persentase 0,27%, yang beragama Konghucu berjumlah 3.880 orang atau dengan persentase 0,23%, dan yang terakhir penghayat kepercayaan sebesar 88 orang.

Penduduk di Banyuwangi mayoritas adalah Islam dengan persentase diatas 95%, seperti pada tahun 1996 penduduk beragama Islam di Banyuwangi mencapai 95,05%. Jika dilihat dari data di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Banyuwangi dari dulu mayoritas beragama Islam, sehingga budaya islam sangat erat dengan budaya sehari-hari masyarakat Banyuwangi. Selain itu adanya pondok pesantren yang menyebar di hampir setiap kecamatan di Banyuwangi.

4.2 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Banyuwangi

Penduduk Banyuwangi sering disebut sebagai orang Using atau orang Blambangan. Orang Using ini tersebar di hampir berbagai wilayah di Banyuwangi. Akan tetapi, tidak semua daerah di Banyuwangi mayoritas orang Using. Terdapat beberapa daerah di Banyuwangi yang mayoritas orang Using, yakni Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Glagah (Desa Bakungan, Kemiren, Karangasem, Olehsari, Cungking, Gontoran), Kecamatan Giri (Desa Boyolangu), Kecamatan Kalipuro (Desa Kalipuro), Kecamatan Gambiran (Desa Gambiran), Kecamatan Gambiran (Desa Mangir, Pancoran, dan Genitri) dan Kecamatan Srono (Desa

Parijatah). Daerah-daerah inilah yang dianggap sebagai daerah yang bermayoritas berpenduduk Using (Anoegrajekti, 2011).

Orang Using banyak tersebar di berbagai daerah di Banyuwangi. Dengan jumlah yang tidak banyak dan bercampur dengan orang dari etnis-etnis lainnya yaitu Jawa, Madura, Bugis, Mandar, Arab dan Cina. Daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Using ini cenderung berada di daerah barat dan utara Banyuwangi, hanya wilayah kalipurolah yang masuk dalam bagian timur di daerah Banyuwangi. Hal ini dikarekan orang Using kebanyakan mendiami daerah pertanian yang subur di Banyuwangi. Daerah-daerah ini yang kemudian dapat disebut mencirikan budaya *keusingannya* Banyuwangi. Pemakaian bahasa yang digunakan sehari-hari berbeda, yakni bahasa Using, logat masyarakat pun berbeda dengan orang dari daerah lain. Logat tersebut sering disebut sebagai logat *Banyuwangen*. Selain itu, daerah inilah yang dianggap masih menjaga tradisi atau budaya Using dengan baik. Biasanya dari daerah-daerah ini budaya Using dapat dilihat, misalnya pertunjukan *Gandrung*, *Jaranan*, *Mocoan* ataupun *Seblang*, dan kebanyakan grup-grup kesenian di Banyuwangi berasal dari daerah tersebut.

Penyebutan orang Using sebagai penduduk asli Banyuwangi tiak terlepas dari sejarah kerajaan Blambangan. Orang Using ini dianggap sebagai orang Blambangan, sebelum ditaklukan oleh Belanda pada tahun 1773. Hal ini erat kaitannya dengan peristiwa perang Puputan (perang) Bayu. Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah pendudukan VOC di tanah Blambangan. VOC membutuhkan waktu dua tahun (1771-1773) untuk mengatasi peperangan yang dipimpin oleh Agong Wilis tersebut (Margana, 2012: 159). Paska perang, orang-orang Blambangan yang tersisa sekitar 5.000 orang melarikan diri atau mengasingkan diri ke daerah pegunungan, dan enggan berinteraksi dengan orang-orang baru yang dibawa oleh Belanda ke daerah Blambangan. Karena itulah masyarakat disebut sebagai orang Using, yang artinya dalam bahasa Using, “tidak”. Kata “*Using*” diberikan oleh orang-orang Jawa *Kulon* (yang merujuk pada daerah Jawa Tengah) ataupun para pendatang kepada orang-orang asli Blambangan yang awalnya tidak mau berinteraksi dengan pendatang. Meskipun pada dasarnya mereka dianggap sebagai komunitas yang terbuka terhadap budaya

baru atau orang baru. Hal ini dibuktikan dengan budaya-budaya yang mereka miliki banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Bali. Akan tetapi, sejarah mereka yang kerap tertindas, membuat mereka memiliki nilai-nilai “semangat” tersendiri yang mengakar kuat dalam budaya mereka sehari-hari.

Penggunaan bahasa Using menjadi ciri khas dari Banyuwangi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh DKB (*Dewan Kesenian Blambangan*) pada tahun 1990, terdapat 53% penduduk Banyuwangi menggunakan bahasa Using. Persentase terbesar terjadi pada ranah keluarga dan lingkungan sebesar 91,6% dan pada ranah kesenian yakni 85%. Terdapat perbedaan mengenai status bahasa Using, ada yang beranggapan bahwa bahasa Using sesungguhnya merupakan bahasa Jawa berdialek Using atau Banyuwangi, ada juga yang menganggap bahasa Using sebagai bahasa tersendiri dengan ciri khas logat bicarannya. Jika dilihat dari penggunaan bahasanya dapat dikatakan masyarakat Banyuwangi sangat menjunjung tinggi bahasa Using, mereka kerap menggunakan bahasa Using dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak semua penduduk Banyuwangi merupakan orang Using. Penggunaan bahasa Using mengakibatkan terjadi proses interaksi atau komunikasi yang mengalir, dan tidak terjadi yang “salah bicara” dalam berbahasa Using, beda dengan bahasa Jawa yang harus disesuaikan dengan keadaanya. Hal ini menjadi salah satu ciri dari masyarakat Banyuwangi yakni terbuka, tidak mengenal penggolongan kelas atau egaliter. Keterbukaan orang Using ini dapat dilihat dari karya-karyanya pantun yang dimiliki oleh masyarakat Using atau dalam bahasa Using disebut “*Wangsalan*”.

Masyarakat Using selain dinamis dalam beragama, dinamis pula dalam kesenian. Hal ini bisa dilihat bagaimana masyarakat Using ataupun Banyuwangi sangat mengapresiasi terhadap kesenian-kesenian yang terdapat di Banyuwangi (Anoegrajekti, 2011). Tidak hanya kesenian yang asli Using, melainkan kesenian-kesenian yang datang dari luar ikut diapresiasi, seperti misalnya Wayang kulit, Wayang wong atau Ludruk. Ketiga kesenian tersebut bukan termasuk kesenian asli Using tetapi masyarakat Using memberikan apresiasi. Hal inilah yang membuat masyarakat Using dianggap sebagai masyarakat yang memiliki apresiasi tinggi terhadap kesenian. Daya apresiasi seni dari masyarakat Using diakibatkan

oleh letak dan sejarahnya yang selalu berkaitan dengan budaya Jawa dan Bali, sehingga masyarakat banyak menerima pengaruh dari budaya Jawa dan Bali ada juga yang menganggap hal tersebut tidak terlepas dari sifat keterbukaan yang dimiliki oleh masyarakat Using dalam menjalin hubungan dengan budaya luar, sehingga mampu mengadopsi sesuai dengan budaya yang dimiliki.

Banyuwangi memiliki 35 kesenian yang masih diapresiasi, kesenian-kesenian tersebut tidak hanya kesenian asli Banyuwangi melainkan juga kesenian hasil akulturasi dengan budaya luar. Kesenian-kesenian tersebut antara lain: *Gandrung, Angklung, Kuntulan, Hadrah, Gedogan, Patrol, Barong, Janger, Jaranan Mocoan, Campursari Jowoan, Wayang Kulit, Ludruk, Kendang Kempul* dan *Gambus*. Dari beberapa kesenian di Banyuwangi yang paling populer di Banyuwangi adalah kesenian *Gandrung* dan *Angklung*. Masyarakat Using tidak hanya tinggi daya apresiasinya, akan tetapi orang Using juga memiliki daya kreatifitas yang tinggi dalam berkesenian. Karya-karya yang diciptakan mengandung nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan masyarakat sering membuat karya-karya yang menggambarkan keadaan sosial pada masanya.

BAB 5. LATAR BELAKANG PENETAPAN GANDRUNG SEBAGAI IDENTITAS KABUPATEN BANYUWANGI

Pada bab ini, kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dijelaskan melalui teori analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Terdapat lima fase dalam proses perumusan kebijakan publik, yakni: (1) penyusunan agenda atau perumusan masalah; (2) formulasi kebijakan; (3) rekomendasi; (4) pemantauan, dan; (5) penilaian (Dunn, 2003: 25). Analisis kebijakan publik pada bab ini menggunakan cara deskriptif. Untuk itu, pembahasan akan difokuskan hingga fase ketiga (rekomendasi). Hal ini agar fokus pembahasan lebih terarah, karena fase ke-4 dan ke-5 pada dasarnya digunakan untuk analisis kebijakan cara normatif (bertujuan untuk memberi kritikan terhadap kebijakan publik).

5.1 Perumusan Kebijakan Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi

Fase pertama dalam proses perumusan kebijakan adalah penyusunan agenda atau perumusan masalah. Dalam konteks penelitian ini, perumusan masalah yang berkaitan dengan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dapat dipahami dengan melihat situasi sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan.

Perkembangan politik nasional di akhir pemerintahan orde lama cukup mempengaruhi eksistensi Gandrung di Banyuwangi. Poros-poros politik saat itu menggunakan gandrung sebagai alat mobilisasi dan propaganda untuk menarik simpati masyarakat. Lembaga Kebudayaan Rakyat, salah satu organ partai komunis bahkan mengharuskan lagu *Genjer-genjer* sebagai lagu pengiring pada pertunjukkan Gandrung. Dewasa ini, pengaruh politik orde baru masih begitu kental. Sehingga beberapa desa tempat konsentrasi masyarakat Using sempat melarang pertunjukkan gandrung dengan alasan historis tersebut.

Legitimasi identitas Using (khususnya Gandrung) di Banyuwangi dimulai pada masa pemerintahan Bupati Djoko Supaat Slamet (1966-1978). Pada masa itu

eksistensi Gandrung cenderung meredup seiring dengan masifnya budaya asing yang masuk ke banyuwangi. Bupati Djoko Supaat Slamet memberi kesempatan kepada pelaku-pelaku seni Gandrung untuk tetap berkarya, dengan catatan tanpa membawa misi penyebaran paham komunisme. Nama-nama populer seperti Andang (pencipta lagu), Slamet (koreografer), Endro Wilis (pencipta lagu) bahkan masih tetap menghasilkan karya seni.

Gandrung sebagai budaya asli masyarakat Using mulai dipandang sebagai komoditi pariwisata yang cukup menjanjikan pada masa pemerintahan orde baru. Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1983 tentang kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Nasional dengan memberikan jalur kemudahan antara lain:

- 1) memberikan pembebasan visa masuk bagi wisatawan bisnis dari negara lain;
- 2) pembukaan jalan dan pintu masuk penerbangan dan kapal laut;
- 3) kemudahan untuk menunjang usaha-usaha yang bergerak di sektor pariwisata, seperti pengkreditan/keringanan pajak, bea masuk, perijinan pemerintah pusat dan daerah;
- 4) meningkatkan pendidikan kepariwisataan untuk menciptakan tenaga kerja profesional;
- 5) pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah harus mulai mengadakan pembenahan perencanaan pengembangan dengan menggali aset-aset wisata yang masih terpendam di wilayahnya untuk dapat diangkat sebagai aset nasional.

Fase berikutnya adalah formulasi kebijakan. Fase ini menggambarkan aktivitas pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang akan menjadi kebijakan publik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat berbagai alternatif yang dapat menjadi pemecah permasalahan (Dunn, 2003: 24) pada fase sebelumnya.

Pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibawah kepemimpinan Bupati Samsul Hadi mulai melakukan penataan terhadap sektor

pariwisata daerah. Berdasarkan catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Banyuwangi membentuk, mengelola, dan mengatur sektor pariwisata melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang tentang Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memajukan pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. Peraturan tersebut digunakan sebagai landasan hukum bagi setiap pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Bupati Samsul Hadi menanggapinya dengan mulai mempromosikan Banyuwangi ke tingkat nasional. Kebijakan pada era kepemimpinan Bupati Samsul Hadi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dimulai dengan membangun Patung Gandrung di Kawasan Obyek Wisata Watu Dodol sebagai pintu masuk utama Kabupaten Banyuwangi.

Fase yang ketiga yakni fase rekomendasi atau fase adopsi kebijakan. Menurut Dunn (2003: 24), pada fase ini, eksekutif bersama-sama dengan legislatif melakukan konsensus untuk menetapkan suatu rumusan kebijakan publik. Puncak dari fase ketiga ini ialah dikeluarkannya produk hukum yang menegaskan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi.

Gandrung secara resmi ditetapkan sebagai maskot Pariwisata Banyuwangi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 173 Tanggal 31 Desember 2002. Dari berbagai budaya yang muncul dan berkembang di Banyuwangi Gandrung keluar sebagai maskot pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dalam perkembangannya, Gandrung tidak hanya menjadi maskot pariwisata, namun mulai dipandang sebagai identitas umum Kabupaten Banyuwangi. Penetapan Gandrung menjadi identitas Banyuwangi didorong oleh beberapa alasan. Berikut hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor-faktor yang mendorong penetapan Gandrung menjadi identitas Kabupaten Banyuwangi.

5.2 Faktor-Faktor Penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi

5.2.1 Faktor Politik

Masyarakat Banyuwangi terdiri atas beragam kelompok etnis. Mereka menyebar di berbagai penjuru Kabupaten Banyuwangi dan hidup secara berdampingan selama bertahun-tahun. Masyarakat Jawa mendiami sebagian besar

wilayah selatan hingga mendekati wilayah tengah. Masyarakat Madura tersebar di wilayah barat-hingga utara (di sekitar perbatasan Situbondo, Bondowoso, dan Jember), sedangkan kelompok masyarakat Using berada di sekitar wilayah timur (pusat pemerintahan Banyuwangi).

Pergantian kekuasaan eksekutif seringkali turut membawa kepentingan politik etnis dalam setiap perumusan kebijakan. Anoeграjekti (2015) mengemukakan perebutan hegemoni kaum elit birokrat daerah di Banyuwangi juga turut bersentuhan dengan perkembangan kebudayaan. Identitas etnis masing-masing penguasa (bupati) di Banyuwangi seringkali mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang strategis.

Penetapan gandrung sebagai identitas Banyuwangi bermula saat kemenangan politik Samsul Hadi sebagai Bupati Banyuwangi periode 2000 hingga 2005. Samsul Hadi merupakan penguasa Banyuwangi yang berasal dari kelompok masyarakat Using. Pada masa inilah peneguhan identitas Using semakin menemukan momentumnya.

Sebagai orang Using, Samsul Hadi, mengeluarkan kebijakan Banyuwangi *Jenggirat Tangi* yang bermakna “kebangkitan Banyuwangi”. Menurut Indiarti (2016: 10) dalam karya “*Masa Lalu Masa Kini Banyuwangi: Identitas Kota dalam Geliat Hibriditas dan Komodifikasi Budaya di Perbatasan Timur Jawa*” menegaskan, istilah *jenggirat tangi* sangat bernuansa Using-sentris. Proyek politik identitas yang dijalankan oleh Samsul Hadi salah satunya diwujudkan dalam bentuk penetapan gandrung sebagai maskot pariwisata. Maka dimulailah secara masif pembangunan patung gandrung di sudut-sudut kota dan berbagai titik utama di Banyuwangi yang kemudian menjadi landmark wilayah ujung timur Jawa tersebut. Pembangunan patung gandrung tersebut seolah menjadi penanda Banyuwangi sebagai kota gandrung, kotanya *lare Using* (orang Using).

Program politik *Jenggirat Tangi* ditetapkan sesuai SK Bupati No. 371 tahun 2002. Bentuk realisasi program *Jenggirat Tangi* antara lain penetapan Gandrung sebagai maskot pariwisata, pemancangan patung-patung Gandrung, pendirian akademi Gandrung, penerbitan Kamus Bahasa Using, penggunaan bahasa Using pada Hari Jadi Banyuwangi, pekan berbusana Using, diajarkannya

bahasa Using sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah, penerbitan majalah berbahasa Using “Seblang”, dan penetapan lagu Umbul-umbul Blambangan sebagai lagu masyarakat Banyuwangi,.

Bagi beberapa pihak, program tersebut dipandang tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan kehidupan sosial masyarakat Banyuwangi, dengan alasan bahwa etnis yang bertempat tinggal di Banyuwangi bukan hanya masyarakat Using saja. Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi secara umum dapat terlihat sebagai upaya politik etnis Bupati Samsul Hadi. Kebijakan ini secara tidak langsung berhasil meneguhkan legitimasi budaya Using ditengah-tengah keberagaman budaya dari berbagai etnis masyarakat Banyuwangi.

5.2.2 Faktor Ekonomi

Masa-masa awal kepemimpinan Bupati Samsul Hadi merupakan masa reformasi bangsa di Indonesia di berbagai bidang. Perekonomian nasional yang sempat terpuruk di akhir periode orde baru memaksa pemerintah untuk kreatif membangun sektor ekonomi. Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah otonom yang memiliki andil dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan akan pembangunan nasional yang juga didukung dari keberhasilan pembangunan daerah menjadi sangat penting bagi setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk selalu mendorong laju pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan menjadikan masyarakat semakin sejahtera.

Secara geografis, Banyuwangi memiliki potensi wisata alamiah yang cukup baik. Namun, popularitas wisata alamiah Banyuwangi kalah dengan Pulau Bali maupun Kepulauan Nusa Tenggara (wilayah yang berdekatan dengan Kabupaten Banyuwangi). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Choliqul Ridha (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi), pengembangan sektor wisata Banyuwangi, semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang tentang Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memajukan pariwisata, akan mengedepankan

keunikan budaya sebagai ciri pembeda antara pariwisata Banyuwangi dengan daerah sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan seniman-seniman Banyuwangi dalam rangka menentukan “identitas” budaya yang akan menjadi ikon pariwisata Banyuwangi. Budaya yang akan dipilih menjadi ikon tersebut harus memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar ikon identitas Banyuwangi dapat mendongkrak perekonomian daerah, sehingga turut menyokong perbaikan ekonomi nasional yang pada saat itu sedang terpuruk.

Salah satu ciri khas yang telah melekat pada Kabupaten Banyuwangi adalah keberadaan masyarakat Using. Pemerintahan Bupati Samsul Hadi (yang juga berasal dari kelompok masyarakat Using) melihat hal ini sebagai peluang untuk memunculkan budaya Using sebagai identitas lokal Banyuwangi.

Gandrung terpilih sebagai identitas pariwisata Banyuwangi melalui Keputusan Bupati Nomor 173 Tahun 2002. Melalui berbagai pertimbangan dari beberapa pihak, Bupati Samsul Hadi menilai Gandrung sebagai kesenian yang paling diminati masyarakat Banyuwangi. Menurutnya, Gandrung merupakan bentuk kesenian Banyuwangi yang dinamis, dapat diterima oleh mayoritas masyarakat, serta telah dikenal hingga manca negara (*lihat lampiran. Keputusan Bupati Nomor 173 Tahun 2002*). Secara khusus, Bupati Samsul Hadi memerintahkan kepada Dinas Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan (saat ini nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Pemilihan Gandrung menjadi identitas Banyuwangi tidak terlepas dari kepentingan pemerintah daerah untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. Gandrung dianggap memiliki nilai jual ekonomis yang cukup tinggi dibandingkan dengan kesenian lain di Banyuwangi. Selain itu, popularitas gandrung cukup terkenal baik dalam lingkup lokal Banyuwangi maupun masyarakat luas.

5.2.3 Faktor Sosial-Budaya

Kabupaten Banyuwangi terdiri atas beragam kelompok masyarakat. Masyarakat Jawa terkonsentrasi di wilayah barat (sekitar kecamatan Genteng),

masyarakat Madura sebagian besar berada di sekitar perbatasan Banyuwangi - Situbondo, dan masyarakat Using tersebar di sekitar pusat Kabupaten Banyuwangi. Keberagaman kelompok masyarakat di Banyuwangi berdampak pada banyaknya kekayaan lokalistik termasuk dalam hal seni dan budaya.

Dari berbagai kelompok masyarakat yang mendiami Banyuwangi, masyarakat Using dikenal sangat mengapresiasi budaya lokal daerah, khususnya pada bidang kesenian. Anoeграjеkti (2011) menyatakan, dibanding kelompok masyarakat lainnya yang mendiami Banyuwangi, masyarakat Using dipandang lebih menjunjung tinggi kesenian. Sebagian besar kesenian di Banyuwangi muncul dan berkembang dari kelompok-kelompok masyarakat Using.

Kesenian Using pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan budaya lokal masyarakat. Sebagai sebuah budaya, kesenian Using memiliki beragam makna bagi masyarakat pemiliknya. Menurut Keesing (2014), budaya dapat dipandang sebagai sistem adaptif. Berikut beberapa asumsi yang membangun pernyataan tersebut.

- 1) Budaya adalah sebuah sistem yang tersusun atas berbagai pola tingkah laku masyarakat pemiliknya, serta menghubungkan komunitas sosial pada lingkungan tempat tinggalnya (Keesing, 2014:6)
- 2) Perubahan budaya (kondisi kultural) pada dasarnya adalah proses adaptasi melalui mekanisme seleksi alam (Keesing, 2014:7)
- 3) Organisasi sosial dalam sebuah kelompok masyarakat merupakan salah satu komponen yang bersifat paling adaptif (sangat mudah berganti, menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi) (Keesing, 2014:7)

Budaya Using pada dasarnya mampu memenangkan proses “seleksi alam” yang berlangsung ditengah masyarakat Banyuwangi. Banyaknya budaya di Banyuwangi telah menimbulkan proses adaptasi yang begitu ketat. Budaya-budaya yang mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi akan muncul sebagai sebuah identitas masyarakat. Budaya kesenian tari milik masyarakat

Using tampil menjadi salah satu budaya populer di Banyuwangi, salah satunya kesenian Gandrung.

Gandrung sebagai budaya Using muncul dan berkembang di berbagai desa konsentrasi masyarakat Using. Catatan Anograjekti (2011) menyebutkan beberapa desa yang selama ini dikenal melahirkan pelaku-pelaku Gandrung, seperti: Desa Bakungan, Desa Kemiren, Desa Karangasem, Olehsari, Cungking, Gontoran (Kecamatan Glagah); Desa Boyolangu, Kalipura (Kecamatan Giri); Mangir, Pancoran, Genitri (Kecamatan Rogojampi); Desa Gambiran (Kecamatan Gambiran), dan; Parijatah (Kecamatan Srono). Di desa-desa tersebut dapat ditemui grup-grup Gandrung profesional.

Kenyataan bahwa masyarakat Using lebih mengapresiasi keseniannya menjadi salah satu alasan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Using adalah kelompok masyarakat yang melekat dengan karakteristik Banyuwangi. Gandrung sebagai kesenian Using diharapkan dapat semakin memperkuat identitas Kabupaten Banyuwangi.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Gandrung secara resmi ditetapkan sebagai maskot Pariwisata Banyuwangi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 173 Tanggal 31 Desember 2002. Dari berbagai budaya yang muncul dan berkembang di Banyuwangi Gandrung keluar sebagai maskot pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dalam perkembangannya, Gandrung tidak hanya menjadi maskot pariwisata, namun mulai dipandang sebagai identitas umum Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Penetapan Gandrung menjadi identitas Banyuwangi didorong oleh beberapa alasan. Hasil kajian peneliti menunjukkan adanya faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya yang mendorong penetapan Gandrung menjadi identitas Kabupaten Banyuwangi. Faktor politik berupa upaya Bupati Samsul Hadi untuk melakukan legitimasi kesenian Using di tengah keberagaman masyarakat Banyuwangi. Faktor ekonomi ditunjukkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Banyuwangi untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor pariwisata. Sedangkan faktor sosial-budaya berupa adanya apresiasi tinggi masyarakat Using terhadap kesenian daerahnya.
2. Selama tahun 2002 hingga 2018, penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi telah mengalami perkembangan dan perubahan. Pada masa kepemimpinan Bupati Samsul Hadi, Gandrung mendapat porsi yang cukup dominan dalam kegiatan-kegiatan resmi Pemkab Banyuwangi. Walaupun pada awalnya, penetapan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi banyak mendapat kritikan dari kelompok agamawan. Bagi kaum agamawan, Gandrung tidak cocok menggambarkan kondisi kultural masyarakat Banyuwangi yang mayoritas Muslim. Pada masa Bupati Ratna Ani Lestari, legitimasi Gandrung mulai meredup. Hal ini dapat dibuktikan pada saat perayaan

Hari Jadi Banyuwangi Tahun 2005. Dalam acara tersebut, kesenian yang ditampilkan banyak mengandung unsur budaya Bali. Perkembangan Gandrung banyak mengalami kemajuan pada masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas. Pada periode ini, Gandrung berhasil tampil sebagai komoditas pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tersebut dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. bagi penulis, kiranya penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam mengadakan penelitian lanjutan dan lebih memperdalam tentang sejarah lokal di Indonesia.
2. bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Hendaknya memperhatikan sejarah kebudayaan khususnya kebudayaan lokal untuk menambah wawasan sebagai penunjang dalam pengajaran sejarah.
3. bagi masyarakat Banyuwangi, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan kesenian tradisional sebagai warisan leluhur agar tidak mengalami kepunahan di era globalisasi.
4. bagi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dewan Kesenian Blambangan. Perlunya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian tradisional asli Banyuwangi agar tetap dikenal oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anoegrajekti, N & Sariono, A. 2011. Kesenian Gandrung dan Identitas Using: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. *Laporan Penelitian*. Universitas Jember.
- Anoegrajekti, N. 2015. *Podho Nonton (Politik Kebudayaan dan Representasi Identitas Using)*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher (Anggota IKAPI).
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi, 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Budisantoso, Y. 1996. *Antropologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dariharto, 2009. *Kesenian Gandrung Banyuwangi*. Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.
- Desantara, 2009. Banyuwangi Sebuah Catatan. <http://www.desantara.or.id/02-2009/119/banyuwangi-sebuah-catatan/> [5 Juni 2018]
- Dewi, A. 2014. "Tari Batik Jlamprang Sebagai Identitas Budaya Kota Pekalongan, Jawa Tengah". Tidak Terbit. *Skripsi*. Fakultas Bahasa dan Seni. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Faridatin, N. 2016. "Identitas Masyarakat Kabupaten Gresik Pasca-Industrialisasi (Studi Perubahan Sosial di Kota Santri)". Tidak Terbit. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fawaid, M. 2015. "Eksistensi Seni Tari Gandrung Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi". Tidak Terbit. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Jember: Universitas Jember.
- Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto dari Understanding History a primer of Historical Method*. Jakarta: UI Press.
- Husein, U. 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hadi, S. 2007. *Ufuk Kebudayaan Banyuwangi Sejumlah Tulisan: Intervensi budaya & Kebanggaan Lokalistik*. Banyuwangi: Yayasan Pusat Dokumentasi Budaya Banyuwangi.
- Indiarti, W. 2016. Masa Lalu Masa Kini Banyuwangi: Identitas Kota dalam Geliat Hibriditas dan Komodifikasi Budaya di Perbatasan Timur Jawa. *Artikel*. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas PGRI Banyuwangi.
- Kartodirijo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keesing, R. 2014. Teori-Teori Kebudayaan. *Jurnal Antropologi (52)*. FISIP Universitas Indonesia
- Kuntowijoyo. 2013. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Liliweri, dkk. 2014. *Pengantar study kebudayaan*. Bandung: Ujungberung.
- Margana, Sri. 2012. *Ujung Timur Jawa, 1763-1813 (Perebutan Hegemoni Blambangan)*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Maliki, Z. 2012. *Rekontruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Narwoko, (ed). 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Putri. 2017. Dinamika Kesenian Tradisional Reog Ponorogo di Kecamatan Yosowilangun. Tidak Terbit. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jember: Universitas Jember.
- Raharjo, B. 2015. Dinamika Kesenian Gandrung di Banyuwangi 1950-2013. Tidak Terbit. *Skripsi*. Fakultas Sastra dan Budaya. Denpasar: Universitas Udayana.
- Scholte. J. 1927. *Gandroeng van Banjoewangie*.
- Sianipar, M.T. 2002. Antropologi politik: Pengkajian Pendekatan Tingkah Laku dan Kebudayaan Menyoroti Pergerakan Aktor Politik. *Jurnal Sociol Humaniora*, Vol 4 (1).
- Sindara, R. 2013. "Tari Kretek sebagai Identitas Budaya Kabupaten Kudus, Jawa Tengah". Tidak Terbit. *Skripsi*. Fakultas Bahasa dan Seni. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soelaeman, M. Munandar. 2001. *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*. Bandung; PT Refika Aditama.
- Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyanto. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Universitas Jember.

Suhartono, W. Pranoto. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sisterikoyasa, dkk. 2017. *Festival Gandrung Sewu Banyuwangi Sebagai Strategi Revitalisasi Budaya Lokal Menghadapi Masyarakat Generasi Z*. <file:///E:/Kampus/PROSES%20SKRIPSI/jurnal/20195-24231-1-PB.pdf> [Akses terakhir 30 Desember 2017].

Widja, I.G.1998. *Pengantar Ilmu Sejarah dalam Prespektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.

Wawancara kepada Ketua Seksi Tari Dewan Kesenian Blambangan (Bapak Suko Prasetyo, S. Pd) pada 28 Maret 2018.

Wawancara dengan Ketua Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Bapak Ir. Choliqul Ridha, M. Si) pada 17 April 2018.

Wawancara dengan Penari Gandrung (Bapak Rustadi) pada 26 Januari 2018.

LAMPIRAN A: MATRIKS PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	PERMASALAHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Sejarah Lokal	Dinamika Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017	1. Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah 2. Sifat Penelitian: 2.1 Penelitian Lapangan 2.2 Penelitian Pustaka	1) Bagaimana latar belakang Gandrung dijadikan sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017? 2) Bagaimana dinamika kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada 2002-2017	1) Buku pokok dan buku penunjang 2) Wawancara 3) Observasi	Metode Penelitian sejarah: 1) Heuristik 2) Kritik 3) Interpretasi 4) Historiografi

LAMPIRAN B. PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber 1:

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

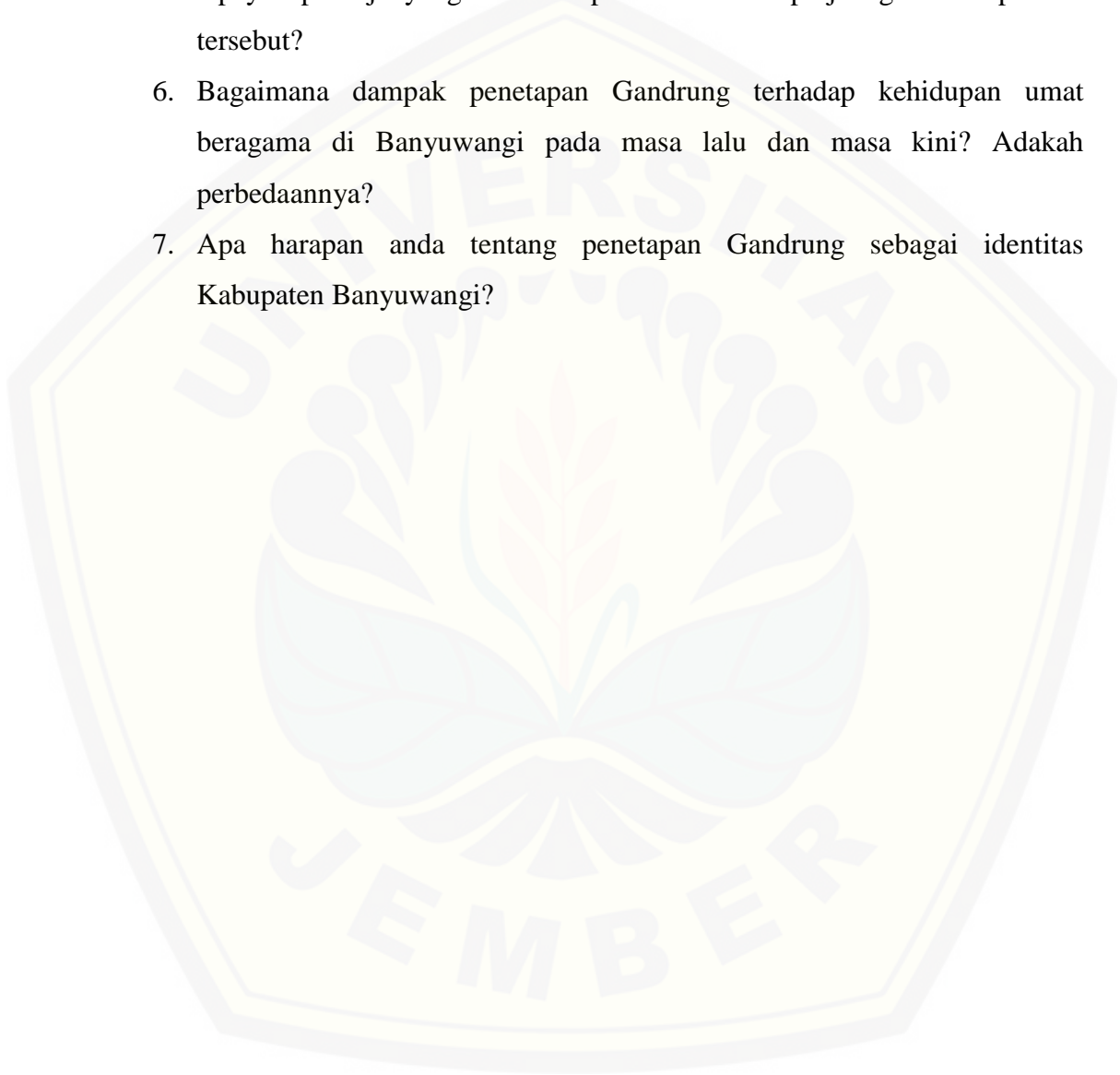
1. Mengapa Gandrung yang dipilih sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana tanggapan Pemerintah terhadap pendapat sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa penetapan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi sarat akan kepentingan politik pada masa itu?
3. Bagaimana tanggapan Pemerintah terhadap pendapat kaum ulama yang memandang Gandrung tidak mencerminkan budaya kaum muslim?
4. Bagaimana sikap Pemerintahan Bupati Syamsul Hadi terhadap penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi?
5. Bagaimana sikap Pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari terhadap penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi?
6. Bagaimana sikap Pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas terhadap penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi?
7. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menunjukkan bahwa Gandrung merupakan identitas Kabupaten Banyuwangi?
8. Bagaimana dampak penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi terhadap kehidupan masyarakat Banyuwangi?
9. Apa harapan pemerintah tentang penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi?

Narasumber 2:

Dewan Kesenian Blambangan

1. Bagaimana sikap kaum ulama/budayawan terhadap penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi, setuju atau tidak?
2. Mengapa anda setuju/tidak setuju dengan penetapan Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi?

3. Bagaimana reaksi Bupati Samsul Hadi, Ratna Ani Lestari, dan Abdullah Azwar Anas terhadap sikap anda?
4. Bagaimana sikap partai politik terhadap fenomena tersebut? Adakah yang pro atau kontra?
5. Upaya apa saja yang anda tempuh untuk memperjuangkan sikap anda tersebut?
6. Bagaimana dampak penetapan Gandrung terhadap kehidupan umat beragama di Banyuwangi pada masa lalu dan masa kini? Adakah perbedaannya?
7. Apa harapan anda tentang penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi?



LAMPIRAN C. HASIL WAWANCARA

Narasumber 1

Nama : Ir. Choliqul Ridha, M.Si
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan - Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
Tanggal Wawancara : 17 April 2018
Lokasi Wawancara : Ruang Kabid Kebudayaan - Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
Jl. Jenderal A. Yani No. 78, Taman Baru,
Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi 68416

Gandrung dipilih sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya merupakan usulan masyarakat. Usul tersebut disampaikan oleh orang-orang Dewan Kesenian Blambangan pada sekitar tahun 2002. Alasan dipilihnya Gandrung sebagai identitas Banyuwangi adalah popularitas Gandrung yang sudah banyak dikenal masyarakat, baik masyarakat Banyuwangi maupun masyarakat luas.

Pemerintah Banyuwangi dibawah kepemimpinan Bupati Samsul Hadi menyetujui usul tersebut. Secara resmi, gandrung ditetapkan sebagai identitas Banyuwangi sejak diterbitkannya Keputusan Bupati nomor 173 Tahun 2002. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang tentang Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memajukan pariwisata pengembangan sektor wisata Banyuwangi, akan mengedepankan keunikan budaya sebagai ciri pembeda antara pariwisata Banyuwangi dengan daerah sekitarnya.

Terkait adanya pro-kontra terhadap penetapan gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi, pemerintah menyadari bahwa setiap kebijakan pasti mendapat kritikan. Selama kritiknya bersifat membangun, maka pemerintah akan selalu mengakomodasi usulan-usulan baru dari masyarakat. Kelompok

agamawan pada dasarnya menginginkan Gandrung lebih bernilai Islami, agar sesuai dengan kultur masyarakat muslim Banyuwangi.

Dinas Kebudayaan sebagai pelaksana teknis kebijakan Bupati, pernah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pariwisata daerah. Sosialisasi berupa pembuatan Kapal Umbul-Umbul Blambangan yang didesain mirip kapal penjelajah Majapahit. Kapal tersebut seharusnya digunakan untuk ekspedisi ke berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan promosi wisata, namun program kegiatan itu tidak menuai sukses besar dikarenakan kapal yang akan dikendarai tidak berfungsi secara normal.

Hingga saat ini, penetapan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi cukup sukses dalam menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pariwisata menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, sejatinya penetaoan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi telah sesuai target awal, yakni peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor pariwisata.

Pemerintah selalu berharap, masyarakat Banyuwangi senantiasa melestarikan kesenian Gandrung sebagai salah satu kekayaan budaya Banyuwangi. Bentuk partisipasi aktif masyarakat dapat berupa mempelajari kesenian Gandrung, ataupun turut memeriahkan pementasan Gandrung diberbagai wilayah.

Narasumber 2

Nama : Suko Budiyanto, S.Pd
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Seksi Tari - Dewan Kesenian Blambangan
Tanggal Wawancara : 28 Maret 2018
Lokasi Wawancara : Kediaman Bpk Suko Budiyanto di Cluring, Banyuwangi

Gandrung mendapat perhatian serius pemerintah pada masa Bupati Samsul Hadi. Pada masa Bupati berikutnya (Ratna Ani Lestari), kebijakan-kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Pengembangan sektor pariwisata budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya (Samsul Hadi) kurang mendapat perhatian dari Bupati Ratna.

Penetapan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi mendapat kritikan dari para kiyai di Banyuwangi. Menurutnya, Gandrung tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi yang sebagian besar terdiri atas umat muslim. Hal ini bahkan berlanjut di tingkat legislatif, anggota DPRD dari partai-partai Islam banyak yang menentang keputusan Bupati tersebut.

Sebagai pegiat budaya, Dewan Kesenian Blambangan menyayangkan sikap agamawan tersebut. Bagaimanapun juga, sulit untuk menemukan titik temu antara seni dengan agama. Apabila seni dipaksa menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran agama tertentu, maka akan menghilangkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kesenian tersebut.

Pada era sekarang, seluruh elemen masyarakat dapat menerima Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat lebih cerdas dengan pola pikir yang lebih modern. Kebijakan penetapan Gandrung sebagai identitas Banyuwangi telah berhasil mendongkrak pendapat daerah Banyuwangi secara signifikan.

Narasumber 3

Nama : Rustadi
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Penari Gandrung (Cucu pelopor tari Gandrung)
Tanggal Wawancara : 26 Januari 2018
Lokasi Wawancara : Kediaman Bpk Rustadi di Cluring, Banyuwangi

Gandrung ditetapkan sebagai identitas Banyuwangi karena gandrung merupakan kesenian asli Kabupaten Banyuwangi dan Gandrung merupakan kesenian tertua di Kabupaten Banyuwangi, meskipun banyak kesenian yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi.

Gandrung pada masa penjajahan diperani oleh seorang laki-laki yaitu Marsan kemudian tari Gandrung akhirnya digantikan oleh wanita, karena dalam agama Islam telah diajarkan, bahwa seorang laki-laki dilarang memakai perhiasan dan berpenampilan sebagai wanita. Asal mula penari Gandrung wanita yaitu berasal dari penari Seblang. Pada suatu saat puteri seorang penduduk dukuh Cungsking yang bernama Semi mengalami sakit keras dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Kemudian ibunya menyampaikan ucapan kepada Semi yang sedang sakit tersebut sebagai berikut "kalau engkau sembuh, akan kujadikan Seblang, tetapi jika tidak sembuh ya tidak".

Kebetulan setelah itu Semi sembuh dari sakitnya dan untuk memenuhi ucapan Mak Midah maka kemudian Semi dijadikan penari Seblang. Ternyata banyak orang yang mengaguminya dan selanjutnya setiap malam diusahakanlah oleh orang-orang sekitarnya untuk diadakan pementasan kesenian tersebut. Hal yang dialami Semi juga dialami Temu pada sekitar tahun 1969, kemudian timbullah gagasan dari orang-orang sekitarnya untuk menjadikan Temu sebagai penari Gandrung. Sejak inilah penari Gandrung laki-laki berangsur-angsur kurang sampai tidak ada sama sekali dan sejak itu pulalah Temu menjadi pemula untuk dimulainya babak baru penari Gandrung yang dilakukan oleh wanita sampai sekarang.

Pementasan jenis Gandrung ini biasanya diselenggarakan pada malam hari mulai jam 21.00 sampai jam 04.00 pagi. Kadang-kadang juga pada siang hari menyesuaikan dengan kebutuhan suatu acara tertentu. Penggunaannya antara lain untuk keperluan hiburan suatu acara. Kedudukan penari Gandrung berfungsi sebagai media bagi tuan rumah atau yang punya hajad dalam menjamu tamunya, yaitu lewat bentuk-bentuk tarian sesuai dengan gendingnya. Dalam pementasan kadang-kadang seorang penari Gandrung mampu membawakan beberapa puluh gending, tentu saja menurut kemampuan penari.

Penetapan Gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi dibawah naungan Dewan Kesenian Blambangan, Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabuapten Banyuwangi, dan Pemerintah daerah yang menetapkan Gandrung sebagai Identitas pada Tahun 2002. Pada masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi Gandrung ditetapkan Sebagai Identitas atau Icon Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada bulan Desember Tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 173 Tahun 2002.

Penetapan Gandrung mendapatkan Pro-Kontra dari masyarakat Banyuwangi, para ulama menyatakan bahwa Gandrung tidak pantas dijadikan sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi karena melambangkan kemaksiatan (tidak sesuai dengan masyarakat banyuwangi yang sebagian besar umat muslim), tetapi Bupati Samsul Hadi tetap menetapkan Gandrung sebagai Identitas karena Gandrung merupakan kesenian asli dari Kabupaten Banyuwangi.

Kesenian Gandrung setelah ditetapkannya sebagai identitas semakin berkembang dan pada Tahun 2012 Dewan kesenian Blambangan mengadakan Gandrung 1000 di Pantai Boom dan BEC (*Banyuwangi Etno Carnival*) Kabupaten Banyuwangi.

Masyarakat Banyuwangi merasa bangga kepada pemerintah Daerah yang peduli dan mengembangkan Kesenian Banyuwangi serta meningkatkan pariwisata Banyuwangi.

LAMPIRAN D. Foto-Foto Penelitian (Penyebaran Patung Gandrung di Wilayah Kabupaten Banyuwangi)



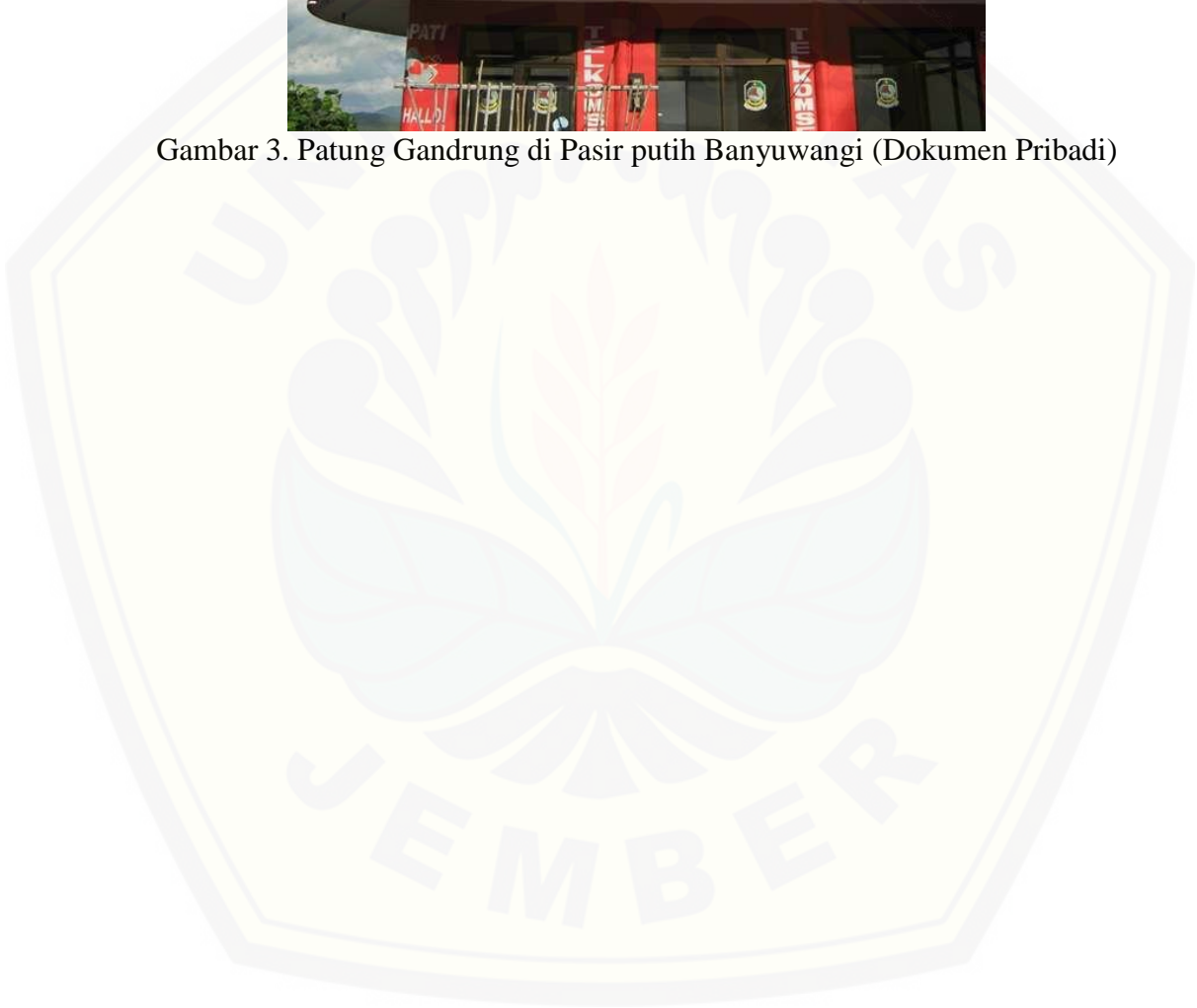
Gambar 1. Patung Gandrung di Gunung Gunitir (Dokumen Pribadi)



Gambar 2. Patung Gandrung di Tempat Wisata Bajul Mati Situbondo (Dokumen Pribadi)



Gambar 3. Patung Gandrung di Pasir putih Banyuwangi (Dokumen Pribadi)

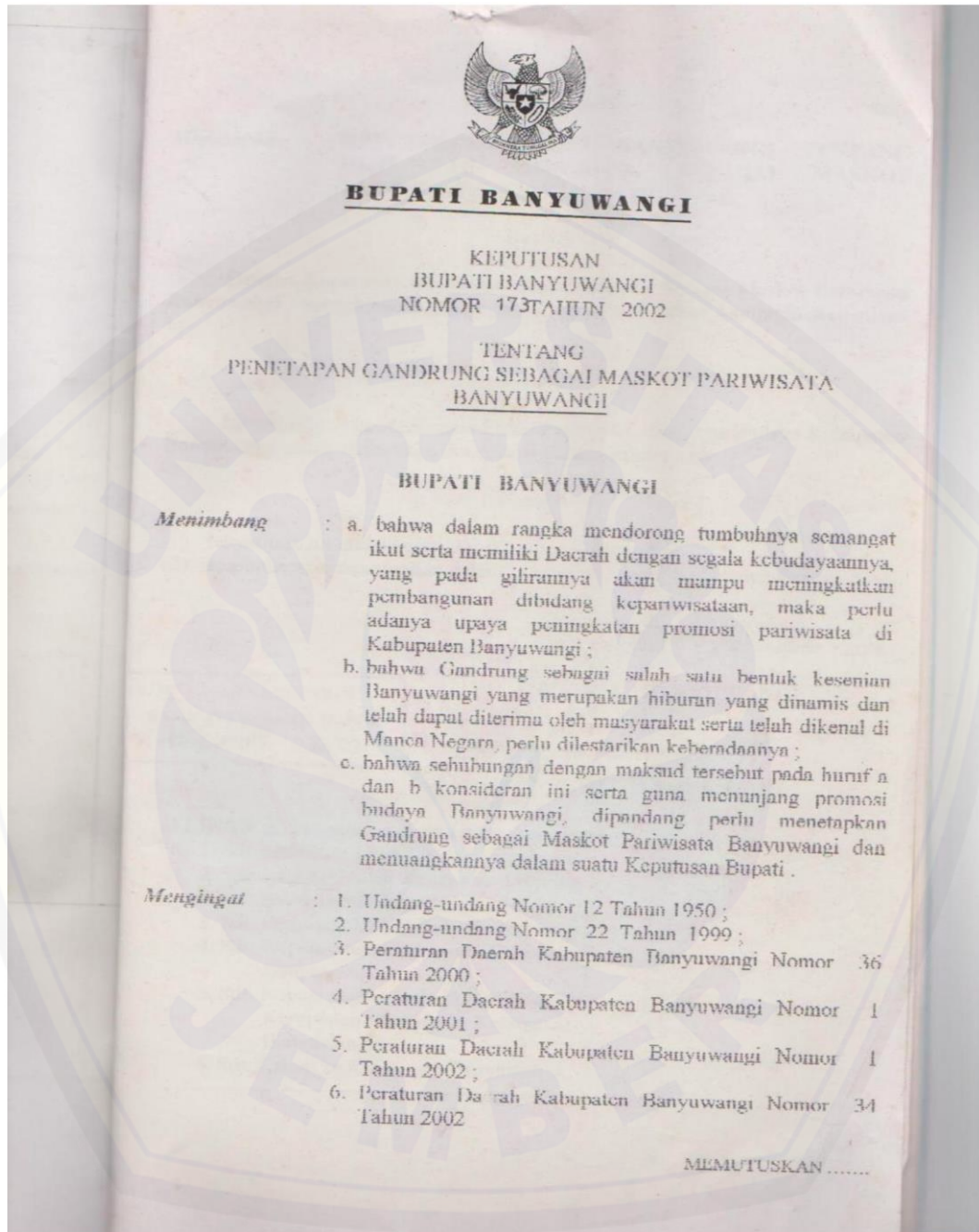


LAMPIRAN E. Peta Kabupaten Banyuwangi



Gambar 1. Peta Kabupaten Banyuwangi

(https://www.google.co.id/search?biw=1600&bih=829&tbm=isch&sa=1&ei=TwRjW5H3M8mX8QWB0ZOQBg&q=peta+kabupaten+Banyuwangi&oq=peta+kabupaten+Banyuwangi&gs_l) [Akses Tanggal 15 Agustus 2018]

LAMPIRAN F. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi

2

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG
PENETAPAN GANDRUNG SEBAGAI MASKOT
PARIWISATA BANYUWANGI .

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, menetapkan Gandrung sebagai Maskot Pariwisata Banyuwangi, sebagaimana gambar yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 31 Desember 2002

TERDAPAT DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
No. 31-12-2002 No. 230/D3



BUPATI BANYUWANGI

Ir. H. SAMSUL HADI

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Banyuwangi ;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Banyuwangi ;
 5. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Banyuwangi .



BUPATI BANYUWANGI

**KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 147 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENETAPAN TARI JEJER GANDRUNG
SEBAGAI TARI SELAMAT DATANG
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Gandrung adalah sebagai salah satu bentuk kesenian Banyuwangi yang merupakan hiburan yang dinamis dan telah dapat diterima oleh masyarakat serta telah dikenal di Manca Negara, sehingga perlu diestarikan keberadaannya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsiderans ini serta guna menunjang promosi budaya yang berciri khas Banyuwangi, dipandang perlu menetapkan Tari Jejer Gandrung Karya SUMITRO HADI tersebut sebagai Tari Selamat Datang di Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2001 ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2002 ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2002 ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN TARI JEJER GANDRUNG SEBAGAI TARI SELAMAT DATANG DI KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal . . .

2

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Tari Jejer Gandrung Karya SUMITRO HADI Tahun 1976 sebagai Tari Selamat Datang di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 2

- (1) Jejer Gandrung dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, memiliki pengertian :
- a. Jejer berarti diperlihatkan, dipertontonkan ;
 - b. Gandrung berarti pesona, memberikan kerinduan ;
 - c. Secara harfiah Jejer Gandrung berarti tontonan yang memberikan kerinduan.
- (2) Alat musik pendukung Tari Jejer Gandrung dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, meliputi :
- dua buah biola ;
 - dua buah kendang ;
 - dua buah ketuk ;
 - dua buah gong (besar dan kecil) ;
 - sebuah triangle (kluncing).

Pasal 3

Busana Tari Jejer Gandrung dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

- Omprok dan geter ;
- Klat bahu ;
- Bora-bora samir ;
- Ilat-ilat ;
- Sembongan ;
- Pending ;
- Kain panjang latar putih ;
- Kaos kaki ;
- Stagen ;
- Selendang (sampur) ;
- Kipas.

Pasal 4

Urutan Gerak, Urutan Gending Pengiring serta Tari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Pasal . . .

Pasal 5

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 31 Desember 2003

REKAMAN DALAM LEMBARAN
KABUPATEN BANYUWANGI
31-12-2003 No 136/03



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Banyuwangi ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kab. Banyuwangi ;
4. Sdr. Badan/Dinas/Kantor/Bagian Komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Banyuwangi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 147 TAHUN 2003
TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

URUTAN GERAK TARI JEJER GANDRUNG

A. Bagian Pertama :

1. Keluar (langkah siji kerep) ngiwir sampur, deleg duwur;
2. Sagah, glebagan (ada-ada/koda kendang);
3. Jejeran tengah : tangan ngayun, 7 x 4 ketuk liwungan (berputar seperti angka 8)
2x 4 ketuk ukel, sirig jingket tangan songklok 1 x 4 ketuk;
4. Jejeran kanan kiri tangan ngayu 7 x 4 ketuk liwungan 2 x 4 ketuk ukel, sirig tangan songklok 1 x 4 ketuk.
5. Jejeran kiri nyiji kerep tangan ngeber deleg duwur 7 x 4 ketuk liwungan 2 x 4 ketuk ukel sirig jingket, tangan songklok 1 x 4 ketuk;
6. Jejeran tengah 3 x 4 sagah kiri

B. Bagian Kedua :

1. Glebagan : sagah kanan, egol 2 x sagah kiri, egol 2 x;
2. Langkah loro 4 x 4 ngiplas sampur;
3. Egolan ditempat/ngeber/deleg/jingketan- sirig 4 x 4;
4. Langkah siji (deleg duwur)-jingketan-egol pinggul 5x4-gebyar sampur-deleg duwur 2x;
5. Langkah loro 3 x 4 (deleg duwur-jingket-egol pinggul);
6. Ngiwir sampur, langkah doble/egol (sindet kendang) 4 x 4;
7. Langkah loro, ngiplas sampur 4 x 4 (sindet kendang);
8. Egol ditempat 4 x 4-sirig-deleg/jingket;
9. Langkah kerep, ngayun kekiri, kekanan;
10. Langkah siji kerep-ngeber ngiwir sampur;
11. Ngiplas ngumbul;
12. Tinjakan kaki kanan, kiri, kanan (sagah buka kipas)-jingket egol.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 147 TAHUN 2003
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

URUTAN GENDING PENGIRING TARI JEJER GANDRUNG

Bagian I:

Giro Bali (pelog) 6 bawo Biola.

6-26 / 1235 / 6515 / 653-12-

3-15-2-13-6-15-3-12

3-11-2-13-6-15-3-12 dst diulang-ulang.

Bagian II:

1. Balian lomba dan kerep (pelog):

3356 ---- 5625 ---- 5653 ---- 653

---- 1321 ---- 3216 ---- 1161 ----

6532 ---- diulang

2. Giro Balian kerep (pelog):

a. 3535 1235 ---- dst diulang-ulang.

b. 3535 3532 ---- dst.

c. 3565 1563 3235 653 -

2-1-3-2-166-123 5555-kembali (6)

3. Tinjakan (tanpa metrik):

Biola: 1235 ---- 356 ---- 3 ---- 532

---- 356 ---- 532 ----

Bagian III : Poda Nonton (Slendro)

612 ... 2166 ... 335326 ... 12133 ...
 fa - da non - ten
 32 ... 231 ... 2123 ...
 Tudak sempal e-man
 612 ... 231 ... 2122 ...
 ring-nga - lu - tung
 231 ... 6 ... 321 ... 232 ...
 ya-pen - dite e-man
 11233 ... 3321 ... 112161 ...
 pa-dak sem pal
 112166 ... 12161 ... 121665 ...
 lam-be - ya ne mbok para
 1212 ... 66 ... Tanpa matrik
 pu-tra

Bagian IV : Kembang Menur (Slendro)

1236 - 321 / 3-53 / 2353 / 3-51 /
 ① yara mula kembangmenur
 1232 / 2-32 / 1353 / 3-52 / 1231 /
 melik melik ring beben
 2-32 / 1353 / 3-52 / 1262 / 1-52 /
 tur ya suh siram sin siram alum -
 5312 / 6356 / 5165 / 3--12 / 3--12 /
 yara mula
 3 i 65 / 6321 / 3--12 / 3--12 / 5 i 65 /
 mencirat ati
 6321 / 3 ... dst. diulang-ulang
 ② laré angon - qumuk rika
 paeulana - sun tanduri
 kembang lanjaron - yara mula
 Ulih sak-unting

BUPATI BANYUWANGI

 H. H. SAMSUL HADI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 147 TAHUN 2003
TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

TARI JEJER GANDRUNG









BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/789/KEP/429.011/2013
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
UNTUK KEGIATAN PANITIA PARADE PAJU GANDRUNG 2013
DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Panitia Parade Paju Gandrung 2013 di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah untuk Kegiatan Panitia Parade Paju Gandrung 2013 di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
 7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013;

2

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi 23 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PANITIA PARADE PAJU GANDRUNG 2013 DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah untuk Kegiatan Panitia Parade Paju Gandrung 2013 di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

- a. Penerima dana hibah adalah Ketua Panitia Parade Paju Gandrung 2013 di Kabupaten Banyuwangi bernama Suko Prayitno.
- b. Alokasi Dana Hibah sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013, Nomor Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.62.00.00.5.1 Belanja tidak langsung, kode rekening 5.1.4.05.01. (Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta), Pos Hibah kepada Panitia Paju Gandrung.

KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 November 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/149/KEP/429.011/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN BLAMBANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI
MASA BAKTI TAHUN 2014-2018

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali, membina dan melestarikan seni/cagar budaya dan kepariwisataan yang tumbuh di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan upaya pengembangan dan pelestarian seni budaya dan kepariwisataan tersebut melalui wadah kreatifitas dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Dewan Kesenian Blambangan Kabupaten Banyuwangi Masa Bakti Tahun 2014-2018 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI MASA BAKTI TAHUN 2014-2018.
- KESATU : Membentuk Dewan Kesenian Blambangan Kabupaten Banyuwangi Masa Bakti Tahun 2014-2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

2

- KEDUA : Tugas Dewan Kesenian Blambangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah:
- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan seni dan budaya melalui program-program pendidikan, pelatihan, pertunjukan, penelitian, pengkajian, advokasi, pendokumentasian seni budaya dan berupaya meningkatkan seni budaya serta kualitas hidup seniman dan budayawan di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi dan jati diri daerah Banyuwangi di bidang seni budaya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Melaksanakan pembangunan bidang seni budaya dan kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai kualitas hidup yang bersifat luhur dalam segala aspek kehidupan baik aspek fisik, psikologi, sosial budaya dan spiritual;
 - d. Melaporkan program kegiatan setiap semester kepada Bupati Banyuwangi melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Masa Kepengurusan Dewan Kesenian Blambangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berakhir pada tanggal 14 Februari 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Pebruari 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/149/KEP/429.011/2014
 TANGGAL : 14 FEBRUARI 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN KESENIAN BLAMBANGAN
 KABUPATEN BANYUWANGI
 MASA BAKTI TAHUN 2014-2018

NO	JABATAN DALAM DKB	KETERANGAN/NAMA
1	2	3
I	PELINDUNG	a. Bupati Banyuwangi b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
III	DEWAN PLENO: 1. KETUA 2. WAKIL KETUA I 3. SEKRETARIS 4. ANGGOTA	H. Hamzawi Adnan H. Asma'ul Hadi, S.H., M.M. Drs. Masykur, M.Pd. a. Drh. Budianto, M.M. b. Dra. Hj. Sumartini c. Sahuni, S.Sn., M.M. d. Ir. Setiawan Subekti e. H. Sutejo Hadi f. H. Andang CY. g. Hasnan Singodimayan
IV	PENGURUS HARIAN: 1. KETUA 2. WAKIL KETUA I 3. WAKIL KETUA II 4. SEKRETARIS 5. WAKIL SEKRETARIS 6. BENDAHARA 7. WAKIL BENDAHARA	Samsudin Adlawi Drs. Hasan Baseri Drs. Totok Hariyanto, M.Si. H. Bambang Lukito, S.H., M.M. Mimhajul Qowim, S.S. Endang Sulistyani, S.Sos. Yulistyo Pujirahayu, S.Sos., M.H.
V	KOMISI: 1. ADVOKASI	a. H. Ipung Purwadi Q., S.H. b. Sarpin c. Ismanto d. Adi Sugiyanto
	2. MUSIK	a. Sayun Sisiyanto, M.Pd. b. Hj. Chasiastoeti c. Yon DD. d. Drs. Sucahyo Pinardi, M.Pd. e. Budi Setiawan f. Kenong g. Ribut h. Haidi Bing Slamet
	3. TARI	a. Punjul Ismuwardoyo, S.Sn b. Suko Prayitno, S.Pd. c. Sabar Hariyanto, M.Pd. d. Slamet Diharjo, S.Sn.

1	2	3
	4. TEATER	<ul style="list-style-type: none"> a. H. Abdullah Fauzi b. Tjatur Pramukho Sakti c. Achmad Ardian d. Drs. Ismurdianto e. Sumiyanto f. Rully Fauzi Latif g. Iwan Rohmatuddin h. Karyono
	5. SENI RUPA	<ul style="list-style-type: none"> a. S. Yadhi K. b. Slamet Sugiono c. Khozin d. Drs. Wiyono e. Hariyanto
	6. ADAT DAN TRADISI	<ul style="list-style-type: none"> a. Dariharto, S.H., M.M. b. Purwadi c. Indra Gunawan d. Sanusi e. Yuwono Lebdo Cerito f. Syamsul Arifin
	7. SENI & EKONOMI KREATIF	<ul style="list-style-type: none"> a. I Ayu Kadek Tirtawati, S.E. b. H. Suyadi c. Subari Sofyan d. Ardian Fanani e. Ibien Kejoyo
	8. SASRA DAN BAHASA	<ul style="list-style-type: none"> a. Dra. Nani Asiani M., M.Pd. b. Dr. Suyanto, M.Si. c. Iqbal Bara'as d. Taufik WR Hidayat e. Fatah Yasin Noor
	9. PENELITIAN, DIKLAT, PENERBITAN DAN PERPUSTAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Drs. Subur Bahri, M.Si. b. Aekanu Hariyono c. Ir. Azhar Prasetyo d. Yeti Chotimah
	10. MARKETING KOMUNIKASI	<ul style="list-style-type: none"> a. Rudi Marwoto b. Sulhan Hadi c. Joko Sunarko d. Mamik Yuniarti
	11. SEJARAH DAN KEPURBAKALAN	<ul style="list-style-type: none"> a. H. Slamet Utomo b. Drs. Suhalik; c. Miskawi, M.Si. d. Agus Mursidi, M.Si. e. H. KRT Ilham Triadi, M.Pd.

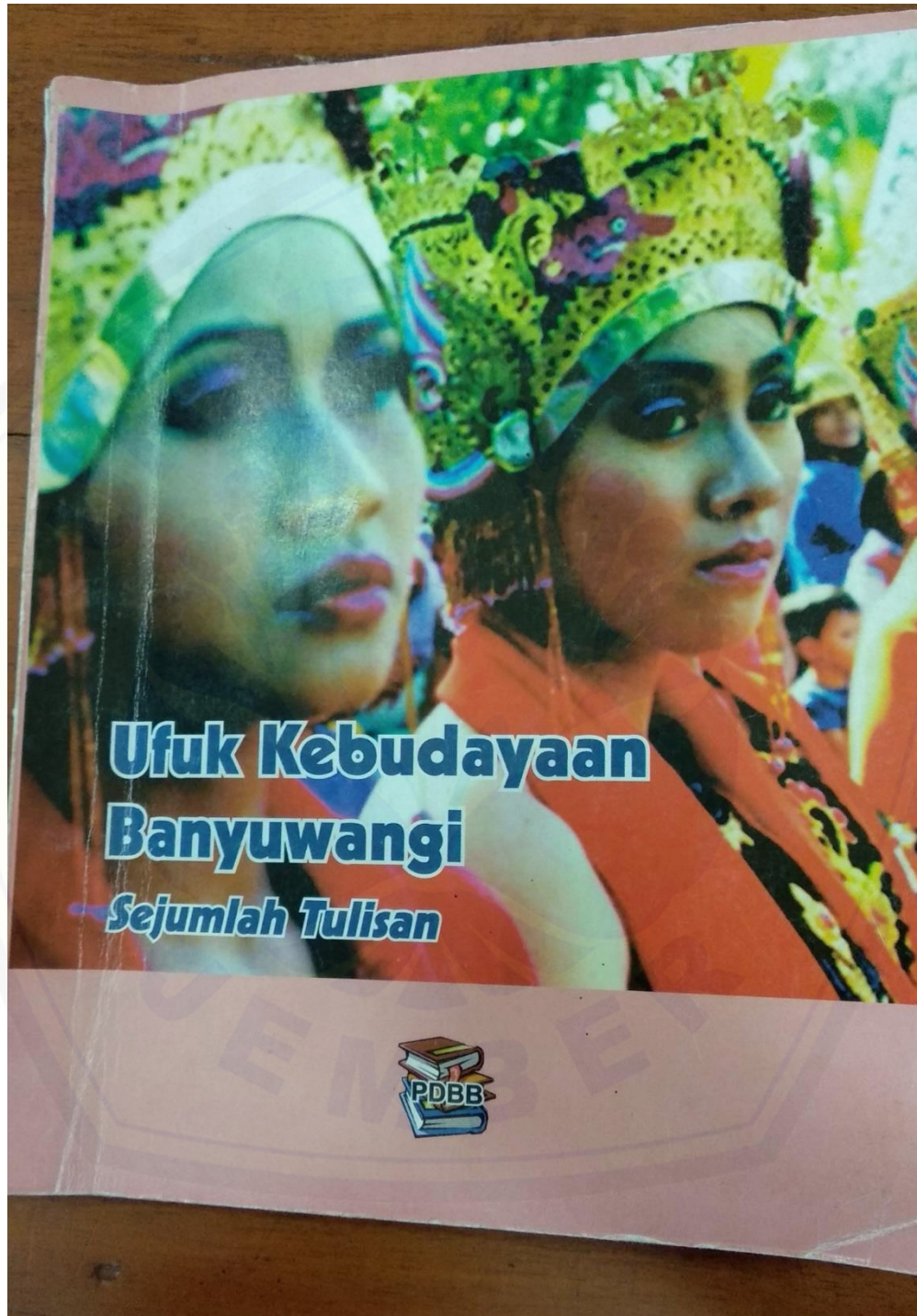
1	2	3
	12. DOKUMENTASI DAN PERFILMAN	a. Aik Abdul Roqib b. Agusta c. Jhon A. Rahmatullah d. Rini Dianingrum, S.Pd. e. Slamet Hariyanto
VI	KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL):	
	1. Korwil I (Banyuwangi dan sekitarnya)	a. Zaini, S.Ap. b. Kuntjoro
	2. Korwil II (Rogojampi dan sekitarnya)	a. Julaidi b. Rama Hadiyono, S.T.
	3. Korwil III (Purwoharjo dan sekitarnya)	a. Sutaji, S.Pd. b. H. Dek Genjong
	4. Korwil IV (Genteng dan sekitarnya)	a. Prawiro Kumboko b. Totok

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN G. Buku Karya Bapak Samsul Hadi selama menjabat sebagai
Bupati Banyuwangi



Ufuk Kebudayaan Banyuwangi
Sejumlah Tulisan

Penulis:

Ilham Juanda, Ir. H. Samsul Hadi, Hamsin Muansin, S.Pd.I.,
Sofyan Yunus, Achmad Aksoro, Armaya, Endro Wilis,
Fatah Yasin Noor, Drs. Dasuki Noer, Hasan Ali, Abdullah Fauzi,
Iwan Aziez Siswanto S., Dwi Pranoto, Decky Irmawan,
Drs. Suhalik, Ahmad Taufiq Alwi, Taufiq Wr. Hidayat,
Rico Odivanny MS, Mas Soepranoto, Fatrah Abal,
Nila Paramitha Kresna, Marcelinus Florianus

Sampul Depan:

Gandrung Banyuwangi

(Cropping dari Sampul Buku Antologi Puisi Tiga Bahasa "Banyuwangi")

Tata Letak:

Senja PageMaker

Diterbitkan oleh:

Yayasan Pusat Dokumentasi Budaya Banyuwangi (PDBB)

*(Pernah diterbitkan oleh Forum Diskusi Seni dan Budaya Banyuwangi, 2001
Jl. Karimun Jawa No. 12, Telp. (0333) 427471 Banyuwangi*

Cetakan Kedua, Mei 2007

Isi di luar tanggungjawab percetakan

Intervensi Budaya & Kebanggaan Lokalistik

Ir. H. Samsul Hadi

Intervensi Budaya di Banyuwangi

Saya menolak intervensi, karena tidak demokratis. Terlebih intervensi terhadap kebudayaan yang merupakan dasar kehidupan manusia. Saya menyesalkan intervensi atau dominasi tidak sehat terhadap tradisi Banyuwangi yang terjadi pada Pesta Peringatan Hari Jadi Banyuwangi Desember 2005 lalu. Intervensi tentu erat kaitannya dengan dunia politik dan kekuasaan. Sangat ironis dan tidak sehat terjadinya politisasi kesenian di Banyuwangi. Politisasi kesenian tak lain dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Sebab kekuasaan memiliki instrumen birokrasi yang dengan leluasa dapat melakukan pelbagai "injeksi" paksa varian kesenian dengan segala fasilitas dan kewenangannya.

Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) Desember 2005 lalu, jadi bukti terjadinya intervensi dan dominasi tidak sehat terhadap kesenian tradisi di Banyuwangi, yakni terjadinya "injeksi" atau memasukkan secara paksa kesenian Bali di dalam peringatan Harjaba. Saya kecewa dengan hal ini. Terlebih—bukan hanya pemasukan kesenian Bali secara paksa terhadap peringatan Harjaba yang semestinya diisi oleh pelbagai kreatifitas kesenian asli masyarakat Banyuwangi dalam merayakan hari jadi daerahnya—telah terjadi dominasi di mana kesenian tradisi asli Banyuwangi tidak diberi ruang seluas-luasnya untuk bereksplorasi dan berekspresi.

Ufuk Kebudayaan Banyuwangi

Apapun bentuk kesenian yang merupakan salah satu varian kebudayaan, adalah hasil kreatifitas masyarakat yang murni dan beradab. Keberadaban dan kemurnian itu, tentu saja sesuatu yang bagus. Saya tidak alergi dengan apapun bentuk kesenian, dari mana pun asalnya, apakah itu kesenian Bali, Sumatra, Jawa, atau apapun. Semua varian kebudayaan itu boleh dan sah masuk Banyuwangi dan meramaikan Harjaba serta kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Tetapi dalam hal ini—yang benar-benar saya sesalkan dan saya tidak suka—adalah intervensi kekuasaan yang memaksakan kesenian di luar Banyuwangi untuk menjadi bagian dari kehidupan kesenian Banyuwangi yang dihidupi oleh masyarakat dengan kesadaran kultural mereka yang alami. Ini tindakan *a-cultural* dan tidak demokratis. Kebudayaan merupakan hasil dari dialektika unsur-unsur dalam masyarakat. Kebudayaan ialah seni kehidupan itu sendiri (*The Art of Living*). Terjadinya pemaksaan unsur kebudayaan terhadap kebudayaan lain adalah tidak fair! Dalam menentukan eksplorasi dan ekspresi kesenian, murni urusan masyarakat, bukan urusan pemerintah atau budayawan sekalipun. Sebab masyarakat memiliki kreatifitas dalam menentukan corak dan format kehidupan budaya beserta varian-variannya, tanpa intervensi dan tekanan dari pihak mana pun.

Saya berpendapat bahwa Harjaba adalah milik orang Banyuwangi—bukan milik budayawan atau pemerintah daerah secara dominatif dan intervensif. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan meng-iya-kan apa pun kehendak rakyatnya dalam berkesenian. Kalau perlu, Harjaba itu panitianya tidak ada unsur birokratnya. Semua diurus rakyat, pemerintah hanya memberikan fasilitas, dana, dan memudahkan apa pun bentuk kreatifitas masyarakat dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan kesenian. Saya melihat, birokratisasi kesenian yang kentara di Banyuwangi oleh pemerintah kita sekarang. Ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan kebudayaan kita secara sehat. Birokratisasi kesenian tersebut nampak dalam beberapa even yang kita lihat akhir-akhir ini. Semua urusan kesenian dan tradisi diurus pemerintah, sehingga semuanya harus berdasarkan kehendak orang berkuasa. Ini tidak berbudaya dan tidak

Sejumlah Tulisan

menghargai nilai-nilai kreatifitas masyarakat. Jika kita biarkan saja, maka yang terjadi justru pembodohan, pemasungan, dan tindakan pemanfaatan terhadap kehidupan dan kreatifitas rakyat Banyuwangi. Hal tersebut membuat saya tersinggung. Tapi saya heran, kenapa para budayawan itu diam saja? Apakah mereka tidur? Lebih heran lagi, kenapa orang-orang Dewan Kesenian Blambangan tak merespon? Ya, saya maklum, mereka memang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Jadi mereka mungkin hanya nurut apa kata atasan. Namun perlu diingat, apa pun bentuk intervensi dan dominasi paksa terhadap kehidupan kebudayaan masyarakat, akan mengalami perlawanan balik dari masyarakat. Ayo kalau berani, ganti saja bentuk-bentuk kesenian asli Banyuwangi itu—seperti Gandrung, Jebheng Thulik, Kuntulan, Endhog-endhogan, Seblangan, dan lain-lain. Siapa yang berani menggantinya akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Bentuk perlawanan masyarakat dalam hal ini, mereka tidak akan nurut apa kata pemerintah. Ini akan berpreseden buruk bagi siapa pun yang berkuasa—dari sinilah kekuasaan akan semakin kehabisan legitimasi politiknya di tengah masyarakatnya sendiri.

Tradisi dan Kehidupan Sosial di Banyuwangi

Tradisi Banyuwangi dihidupi oleh orang Banyuwangi sendiri. Ini menunjukkan bahwa tradisi dan segala *genuine* lokal di Banyuwangi, merupakan suatu bentuk kuatnya nilai-nilai kultur dalam masyarakat. Segala bentuk even atau pertunjukan kesenian Banyuwangi yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kesenian, bukanlah perwujudan eksistensi dari kebudayaan Banyuwangi itu sendiri. Melainkan pemerintah dan lembaga-lembaga kesenian yang ada hanya sebagai fasilitator dari apa pun bentuk budaya lokal yang diprioritaskan oleh masyarakat Banyuwangi. Bukan malah melakukan pengurangan bahkan peniadaan bentuk budaya yang diprioritaskan masyarakat. Tingginya apresiasi masyarakat terhadap bentuk-bentuk kebudayaan Banyuwangi, menunjukkan rasa bangga mereka terhadap daerahnya. Inilah yang saya sebut dengan "Kebanggaan

Ufuk Kebudayaan Banyuwangi

Lokalistik" dan "Identitas Kedaerahan", di sinilah eksistensi kebudayaan itu terukur. Kebanggaan lokal tersebut yang menjadi "ruh" kehidupan sosial, ekonomi, bahkan kehidupan politik orang Banyuwangi. Menumbuhkan kebanggaan lokal, sangat penting kaitannya dengan misi pembangunan daerah Banyuwangi. Artinya, pembangunan yang substansial adalah pembangunan yang bersifat non-fisik, bukan pembangunan fisik belaka. Coba sampeyan lihat betapa bangganya orang Amerika sebagai warga negara Amerika, di mana-mana mereka ngaku: "I am American"; saya adalah orang Amerika. Kebanggaan ini yang membuat betapa tingginya nilai-nilai peradaban suatu bangsa yang berdiri di atas landasan kebudayaan yang luhur. Kebanggaan lokal dimiliki orang Banyuwangi sejak lama. Di mana-mana orang Banyuwangi disegani, dan kita tidak perlu ragu mengatakan: "Saya adalah orang Banyuwangi", atau "*Isun lare Using*" (Saya orang Using). Dari sinilah kita lalu membangun peradaban—sumber daya manusia dan alam—lokal yang maju dan berbudaya.

Gandrung misalnya. Di daerah-daerah lain orang mengenai Banyuwangi dari Gandrungnya. Orang menyebut: "O... Banyuwangi Kota Gandrung". Kebanggaan lokalistik inilah yang harus dipertahankan dan dihargai oleh pemerintah, sebab ini muncul dari kesadaran kultural masyarakat Banyuwangi secara alamiah. Jepang. Apa yang membuat Jepang disegani dan dikenal seluruh dunia? Tak lain adalah kebanggaan mereka terhadap budaya dan melestarikannya dalam diri tiap-tiap individu orang Jepang. Di mana pun orang Jepang, pasti melakukan penghormatan dengan menundukkan kepala setiap bertemu dengan orang, tidak peduli dari bangsa mana pun itu. Jepang dikenal pula dengan Samurainya, Harakirinya. Dari situlah orang-orang Jepang membangun peradabannya, membangun negaranya, membangun teknologinya. Sederhana sekali, semua berangkat dari kebanggaan mereka terhadap nilai-nilai kultur. Banyuwangi dikenal orang dengan Gandrungnya. Di daerah mana pun di seluruh Nusantara, Banyuwangi adalah Kota Gandrung. Meskipun dalam hal ini Gandrung adalah maskot pariwisata Banyuwangi. Banyuwangi juga dikenal dengan seni Hadrah dari Kuntulan, Seblangan, musik-musik Banyuwangenannya, dan banyak

Sejumlah Tulisan

lagi potensi dan kekayaan budayanya. Dan segala bentuk kebudayaan Banyuwangi itu, benar-benar dihidupi dan dijaga oleh rakyat secara turun-temurun. Artinya, kebanggaan lokal ini benar-benar melekat erat di dalam kehidupan masyarakat kita. Ini terbukti dengan kuatnya apresiasi rakyat terhadap seni tradisi Banyuwangi. Ini harus dipelihara dan diperhatikan pemerintah daerah. Bukan malah mengintervensi kebudayaan dengan keinginan penguasa sendiri dengan memaksakan formula kesenian di luar Banyuwangi. Biarlah masyarakat dengan kebebasan kreatifitasnya memunculkan apa saja bentuk dan formula kesenian tradisi mereka. Sebab jika pemerintah daerah melakukan intervensi, berarti telah melakukan pemasangan kreatifitas dan aspirasi rakyat, dan berarti pula "memusnahkan" tradisi kita secara paksa. Itu akan mendapat perlawanan oleh masyarakat, baik secara kultural—dan yang akan menyedihkan—menyeretnya ke ranah politik. Ini berarti stagnasi atau kemunduran yang semundur-mundurinya!

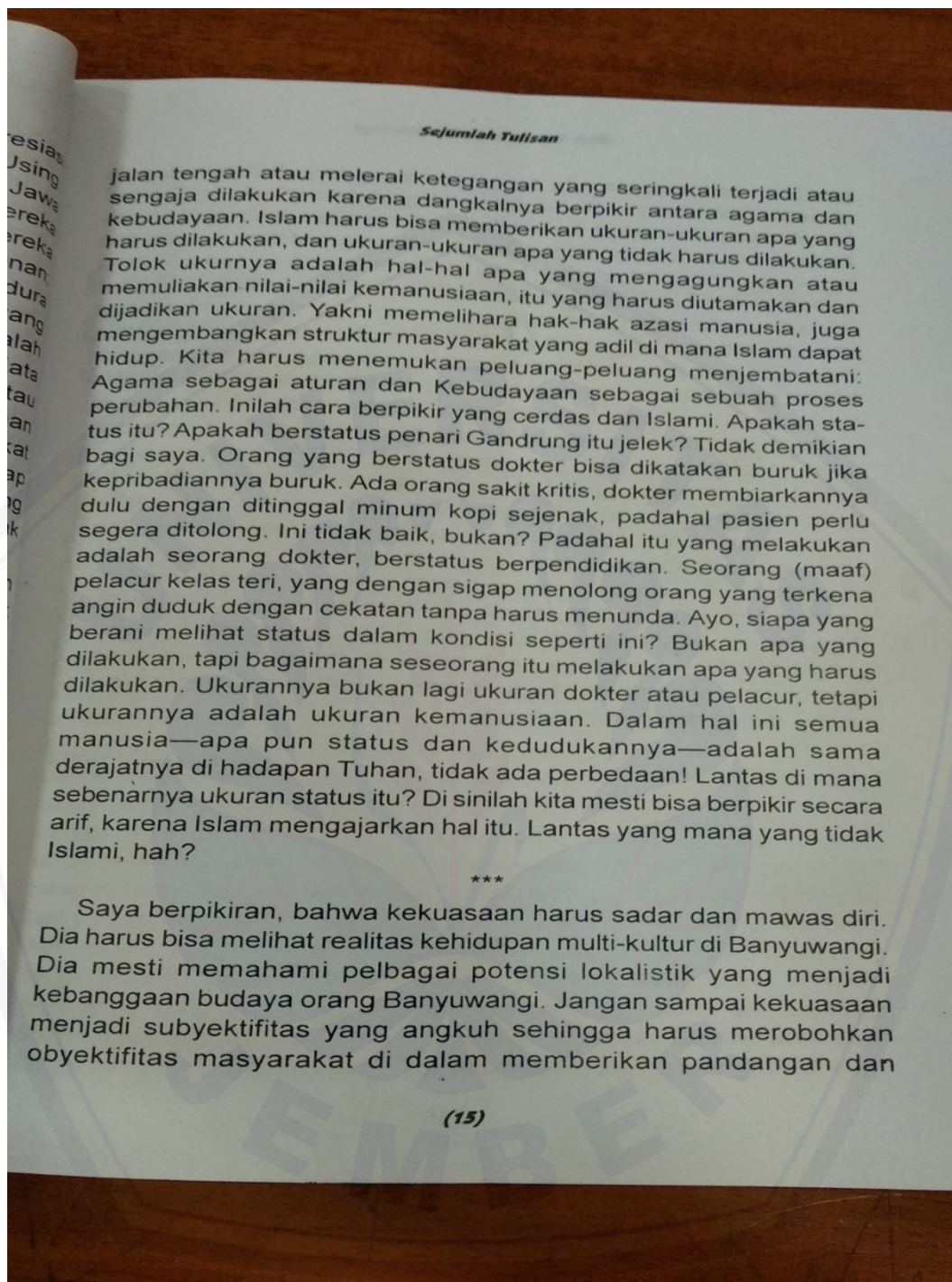
Dalam kehidupan sosial-ekonomi, orang-orang Banyuwangi benar-benar bisa hidup dari dasar pijakan kebudayaan mereka. Lihat saja perdagangan di pasar-pasar yang dilakukan mayoritas orang-orang Madura. Saya lega melihat gerobak sayur yang seringkali lewat di depan rumah saya ketika dini hari. Lega rasanya melihat gerobak-gerobak sayur-mayur yang digandeng sepeda motor untuk dijual ke pasar, tidak sampai siang sayur-mayur dalam gerobak-gerobak itu habis terjual. Artinya apa? Artinya adalah roda perekonomian rakyat berputar dengan baik. Lantas di mana peran pemerintah? Pemerintah cukup memberikan dukungan dan terpenting adalah fasilitas, bahkan kalau perlu pinjaman dana, kepada mereka demi kemudahan sirkulasi perekonomian yang dijalankan rakyat. Jangan sampai pemerintah dan para birokrat itu sok pahlawan. Tanpa mereka, lihat saja betapa mandirinya masyarakat kita di dalam kehidupan sosial-ekonominya, yang tentunya ditopang oleh kebanggaan lokal terhadap Banyuwangi.

Lihat orang Licin atau daerah Taman Suruh yang dikenal begitu kentalnya dengan dialek Using juga Gandrungannya. Kemiren dikenal dengan kesenian Tari Barong (Barong Kemiren), orang-orang Madura dikenal dengan Seni Hadrahnya, Kuntulan, Bakungan dan Olehsari

Ufuk Kebudayaan Banyuwangi

dengan Seblangnya, dan lain-lainnya. Lihat, betapa tinggi apresiasi masyarakat terhadap seni tradisi dan dialektanya, yakni dialek Using. Banyuwangi dipenuhi masyarakat etnis yang majemuk, ada Jawa Mataraman, Madura, Melayu, Arab, Komunitas Cina Buyukan. Mereka bukan orang Using, bukan? Tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan dialek Using. Saya sering menyebutkan guyonan "Esun Madure Oseng, Lek" (Isun Meduro Using, Lek=Saya Madura Using, Dik). Istilah "Dik" dalam dialek Using tidak dipakai. Tapi yang dipakai adalah "Le'", "Isun Meduro Using, Le'". Kata Le' adalah panggilan akrab dalam dialek Using terhadap kawan bicara. Kata "Esun" adalah campuran dialek Using-Madura, dan kata "Lek" atau "Adik", lazim dipakai dalam dialek Madura. Ini adalah "perkawinan bahasa" atau dialek. Dan ini terjadi karena rasa bangga masyarakat kita—yang meskipun majemuk atau bukan asli Using—terhadap Usingan. Ayo, siapa yang berani mengatakan ini bukan kreatifitas yang luar biasa? Ini adalah proses akulturasi yang kreatif dan memiliki watak ke-Banyuwangi-an atau kedaerahan.

Makanya saya sangat kecewa, ketika akhir-akhir ini sejumlah orang—terutama penguasa—mengatakan bahwa Gandrung tidak Islami. Itu adalah pernyataan yang tidak benar! Ayo, kiyai atau agamawan mana yang berani mengatakan Gandrung tidak Islami, silahkan debat dengan saya! Gandrung dan apa pun bentuk kesenian, tentu saja itu bukan agama. Jadi tidak ada agama di dalam kesenian! Yang ada adalah nilai-nilai filosofis yang kalau dikaji memiliki muatan nilai-nilai keagamaan. Apa sih Islami itu? Apakah kalau pakai sarung, sorban dan membaca Qur'an saja itu Islami? Apa sih status itu? Apakah karena statusnya sebagai pemegang jabatan itu berstatus mulia? Saya katakan tidak! Islami adalah nilai-nilai Islam yang diejawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap hidup yang berdasarkan esensi ajaran Islam. Kalau dikatakan Gandrung tidak Islami, saya pikir yang *ngomong* itu tidak *ngerti*! Banyak komedian penari Gandrung, yang sehabis menari dia membuka bungkusannya dalam tasnya—yang isinya mukena—dia pakai mukena itu lalu dia salat. Apa ini bukan sikap pribadi yang Islami? Jangan mengatakan kesenian adalah agama, itu salahnya. Kita harus bisa memberikannya



Ufuk Kebudayaan Banyuwangi

penilaian terhadap segala fenomena yang terjadi dalam segala dimensi kehidupan. Pemerintah jangan jadi "Tukang Dekte" kebebasan masyarakat, baik dalam berkeaktifitas di dimensi sosial-budaya, maupun dalam kebebasan mereka menyatakan aspirasi dan berpendapat. Hal ini penting, kalau pemerintah atau siapa pun yang berkuasa tidak ingin kehilangan legitimasi dari rakyat secara luas. Terjadinya tindakan kecurangan, manipulasi dan pembodohan terhadap rakyat, baik yang dilakukan pemerintah atau pihak-pihak lain, akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan. Ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap dinamika demokrasi politik di Banyuwangi. Lihat saja, betapa besarnya Golput pada Pilkada kemarin. Persoalan ini penting dicermati dan diperhatikan oleh pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, DPRD, dan semua yang terkait. Rakyat harus senantiasa dilibatkan dalam proses berpikir dan pengambilan kebijakan oleh semua pihak yang memegang kebijakan. Kalau tidak, maka lihatlah masyarakat akan menarik legitimasi politiknya dan menarik partisipasinya terhadap apa pun produk kebijakan di Banyuwangi secara beramai-ramai. Ini justru membuat jurang yang lebar antara rakyat dan para pemegang kebijakan di Banyuwangi, akan menjadi ironi yang aktual atau menjadi kelucuan yang tidak lucu. Akhirnya saya akhiri di sini dulu, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan proses-proses dialog dan perenungan. ©

Banyuwangi, 2006

LAMPIRAN H. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: 0331- 334988, 330738 Faks: 0331-332475
Laman: www.fkip.unpej.ac.id

Nomor **3127** /UN25.1.5/LT/2018
Lampiran
Hal : Permohonan Izin Penelitian 13 APR 2018

Yth. Kepala Bakesbangpol
Kabupaten Banyuwangi
di Banyuwangi

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun Skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember dibawah ini :

Nama : Ike Yuliana
NIM : 140210302055
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Bermaksud mengadakan penelitian tentang "Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017" di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi serta Dewan Kesenian Blambangan selama bulan Mei-Juni 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenaan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Prof. Dr./Suratno, M.Si
NIP 196706251992031003





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: 0331-334988, 330738 Faks: 0331-332475
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor **3127**/UN25.1.5/1T/2018
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 APR 2018

Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyuwangi
di Banyuwangi

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun Skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember dibawah ini :

Nama : Ike Yuliana
NIM : 140210302055
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Bermaksud mengadakan penelitian tentang "Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017" selama bulan Mei-Juni 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenaan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Prof. Dr. Suratno, M.Si
NIP 196706251992031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: 0331- 334988, 330738 Faks: 0331-332475
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor **3127**/UN25.1.5/LT/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 APR 2018

Yth. Ketua Dewan Kesenian Blambangan
Kabupaten Banyuwangi
di Banyuwangi

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun Skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember dibawah ini :

Nama : Ike Yuhana
NIM : 140210302055
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Bermaksud mengadakan penelitian tentang "Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017" selama bulan Mei-Juni 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenaan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Dekan
Dekan I

Prof. Dr. Suratno, M.Si
NIP 196706251992031003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 17 April 2018

Nomor : 072/ 473 /REKOM/429.206/2018
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Ketua Dewan Kesenian Blambangan

di

BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Tanggal : 13 April 2018

Nomor : 3127/UN25.1.5/LT/2018

Bersama ini diberitahukan

N a m a : Ike Yuliana

N I M : 140210302055

Bermaksud melaksanakan Penelitian

Judul : Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017

Tempat : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi,
Dewan Kesenian Blambangan

Waktu : 17 April s.d 17 Mei 2018

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta:

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Instansi setempat.
2. Wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil Penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyuwangi

Sekretaris

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Ir. Sugiyono Dermawan, S.AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 196709091997031004

Tembusan :
Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan UNEJ



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 78 Banyuwangi 68416
Telepon. (0333) 424172 Faks. (0333) 412851
email : pemasaran@banyuwangitourism.com
website : www.banyuwangikab.go.id – www.banyuwangitourism.com

SURAT- KETERANGAN

Nomor : 556/ 1418 /429.112/2018

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang bernama :

IKE YULIANA **NIM : 140210302055**

Telah melakukan Penelitian untuk keperluan skripsi dengan judul “Gandrung sebagai Identitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2017” di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 April 2018 s/d 17 Mei 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 17 Mei 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUWANGI



M. Y. BRAMLIDA, S.Sos, MBA, MM

Petugas Tingkat I

NIP.19730126 199201 1 001

LAMPIRAN I. Dokumentasi Wawancara Narasumber



Gambar 1. Wawancara Bapak Rustadi selaku cucu pelopor pertama tari Gandrung [Tanggal 26 Januari 2018]



Gambar 2. Wawancara Bapak Suko selaku ketua seksi tari di Dewan Kesenian Blambangan [Tanggal 28 Maret 2018]



Gamabar 3. Wawancara Bapak Choliqul Ridha sebagai Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi [Tanggal 17 April 2018]

